

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG
TERHADAP ISU NUKLIR KOREA UTARA
(2002-2009)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

**DWI ARSITA WASKITARINI
0606024144**



**Kekhususan Diplomasi Jepang
Program Studi Kajian Wilayah Jepang
Program Pascasarjana
UNIVERSITAS INDONESIA
Depok
Juli 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dwi Arsita Waskitarini

NPM : 0606024144

Tanda Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Dwi Arsita Waskitarini
NPM : 0606024144
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul Tesis : Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Isu Nuklir
Korea Utara (2002-2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Syamsul Hadi (Syamsul Hadi)
Pembimbing : Dr. Sudung Manurung (Sudung Manurung)
Penguji : Prof. Dr. Noerhadi Magetsari (Noerhadi Magetsari)
Penguji : Dr. Tirta Mursitama (Tirta Mursitama)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 17 Juli 2009



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Maha Besar atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat kelulusan program pascasarjana Kajian Wilayah Jepang di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing, Bpk Syamsul Hadi dan Bpk Sudung Manurung.
2. Orang tua saya, Bpk Waskito dan Ibu Sri Dewati Soedewo.
3. Suami saya, Dean Benitez M Antos Saragih
4. Damien Benitez M Reyno Saragih
5. Tommy Waskito dan Adri Waskito.
6. Perpustakaan FISIP UI, perpustakaan CSIS, perpustakaan PSJ, dan perpustakaan JF.
7. Teman-teman Kajian Wilayah Jepang angkatan 2005.
8. Staf Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia.
9. Chiky.

Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberkati dan membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 17 Juli 2009

Dwi Arsita Waskitarini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Arsita Waskitarini
NPM : 0606024144
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Departemen : Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Isu Nuklir Korea Utara (2002-2009) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatlan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan



(Dwi Arsita Waskitarini)

ABSTRAK

Nama : Dwi Arsita Waskitarini
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul : Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Isu Nuklir Korea Utara

Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (*security*). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepsi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (*insecurity*). Menurut Daniel S Pap persepsi dibangun dari komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan.

Setelah dilakukan analisis metode deskriptif, diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengenai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang menuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

Kata kunci:
Kebijakan luar negeri, keamanan, nuklir

ABSTRACT

Name : Dwi Arsita Waskitarini
Study Program : Japanese Studies Area
Title : Japan's Foreign Policies toward North Korea Nuclear Issue

The focus in this thesis is Japan's foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea's nuclear issue to gain both strategic short and long term interests.

This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study-data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion. The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan's foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea's nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

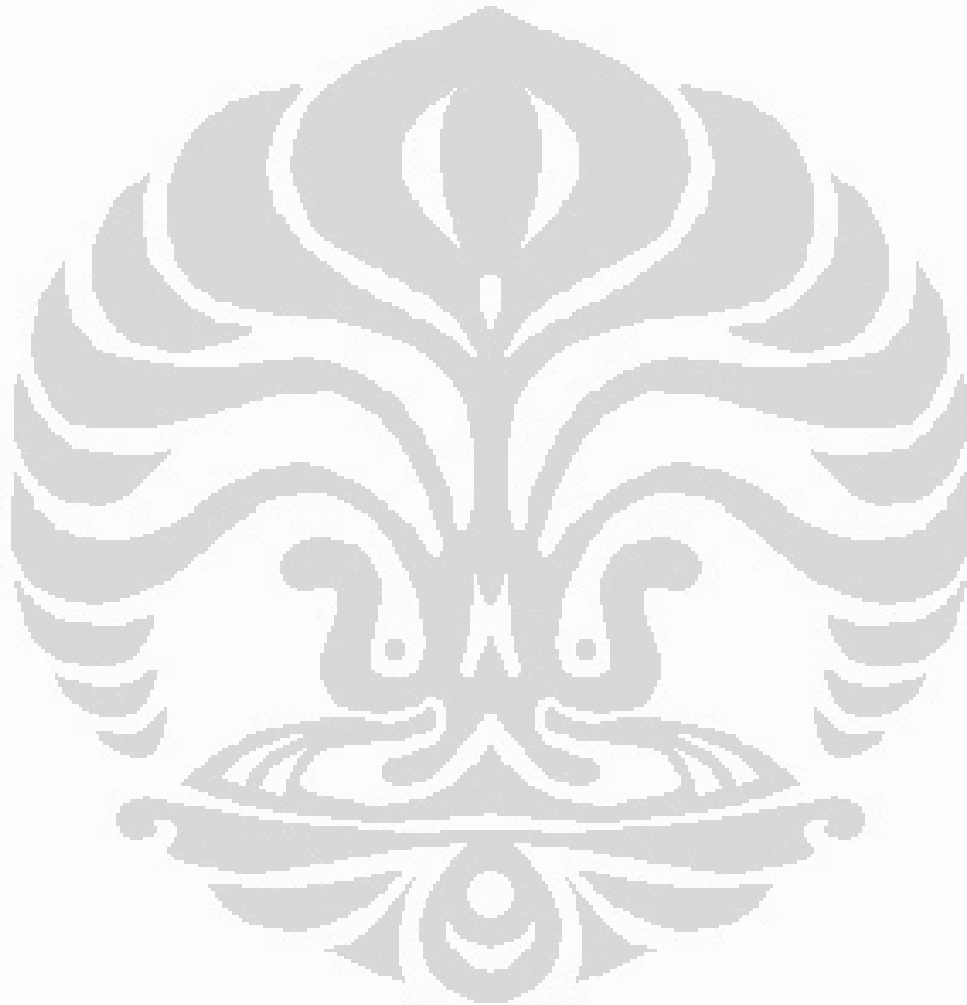
Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted security threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan's strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations normalization; which is Japan's long term interest. Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan's foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan.

Keyword:
Foreign Policy, security, nuclear

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kemaknawian Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Kerangka Teori.....	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
2. SEJARAH DAN DINAMIKA ISU NUKLIR KOREA UTARA.....	16
2.1 Bagaimana Semenanjung Korea Terpecah Menjadi Utara dan Selatan....	16
2.2 <i>Democratic People's Republic of Korea (DPRK)</i>	18
2.3 Hubungan Korea Utara-Jepang-AS.....	26
2.3.1 Hubungan Korea Utara dan Jepang.....	26
2.3.1.1 Kasus Penculikan Warga Jepang oleh Pihak Korea Utara .	27
2.3.1.2 Komunitas Korea di Jepang.....	29
2.3.1.3 Isu Nuklir Korea Utara	30
2.3.2 Hubungan Jepang dan AS	32
2.3.3 Hubungan Korea Utara dan AS.....	36
2.4 <i>Six Party Talks</i> sebagai Upaya Diplomasi Multilateral.....	39
2.5 Hubungan antar Negara-negara Peserta <i>Six Party Talks</i>	42
3. ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ISU NUKLIR KOREA UTARA.....	45
3.1 Jepang sebagai Negara Pecinta Damai.....	45
3.2 Pentingnya Isu Nuklir Korea Utara bagi Jepang.....	47
3.3 Opini Publik di Jepang	53
3.4 Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Korea Utara.....	54
3.5 Diplomasi Jepang: Kombinasi antara Diplomasi Multilateral dan Bilateral	60
3.5.1 Diplomasi Multilateral: <i>Six Party Talks</i>	60

3.5.2 Diplomasi Bilateral dengan Korea Utara	62
3.6 Efektifitas Diplomasi Jepang dalam Isu Nuklir Korea Utara	69
4. KESIMPULAN.....	74
DAFTAR REFERENSI	76
LAMPIRAN.....	85



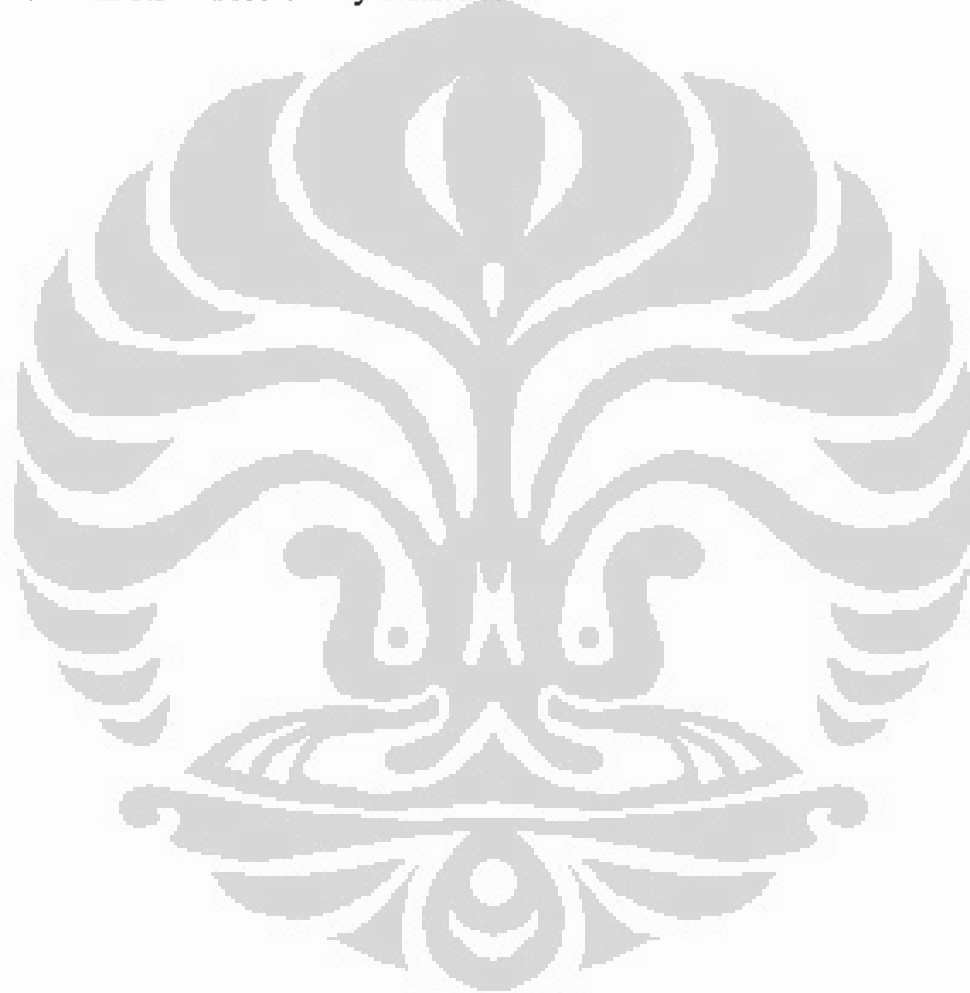
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dinamika Nuklir Korea Utara.....	51
Tabel 3.2	Sanksi-sanksi Jepang kepada Korea Utara.....	57
Tabel 3.3	Bantuan Luar Negeri Jepang ke Korea Utara.....	59
Tabel 3.4	Perundingan Normalisasi Jepang-Korea Utara.....	63
Tabel 3.5	Perundingan Isu Penculikan Jepang-Korea Utara.....	64



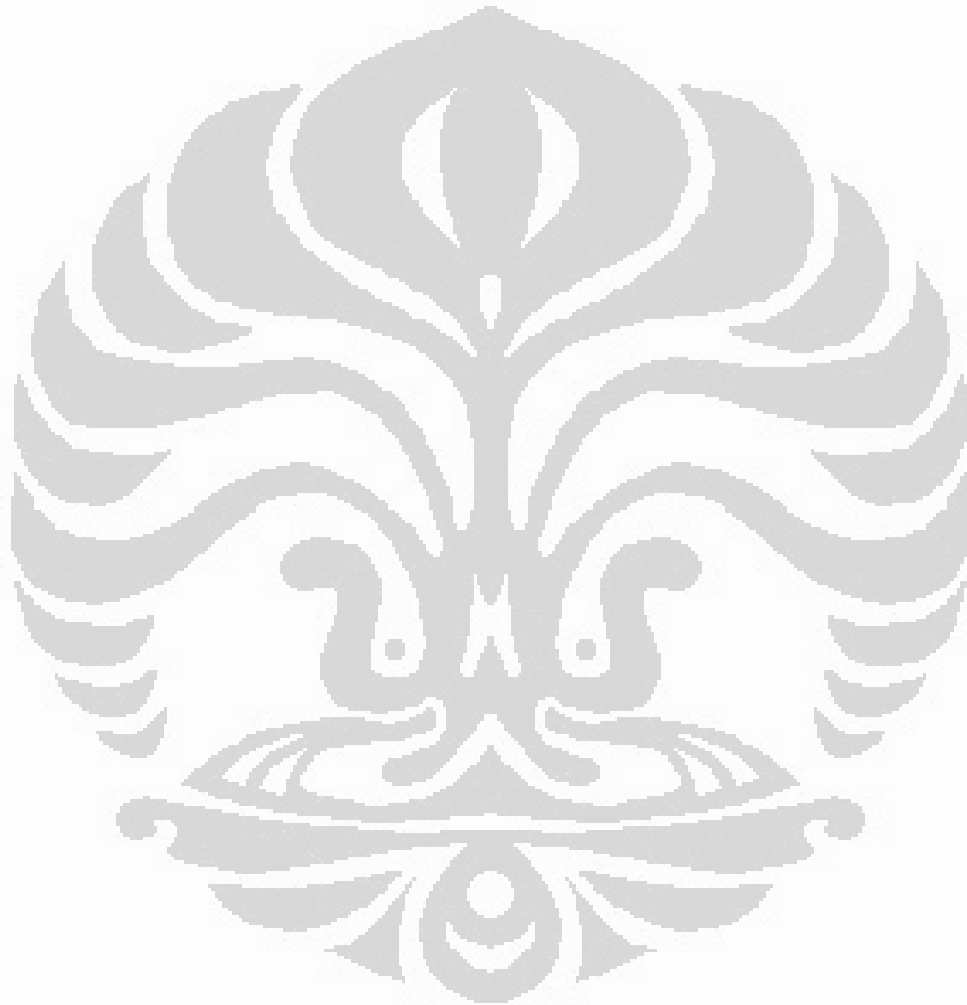
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Partai-Militer-Negara Korea Utara.....	20
Gambar 3.1	Peta Asia Timur.....	52
Gambar 3.2	Grafik Bantuan Luar Negeri Jepang ke Korea Utara 1995-2004.....	60
Gambar 3.3	Proses Penyelesaian Isu Nuklir Korea Utara.....	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perbandingan Jepang dan Korea Utara.....	85
Lampiran 2: Kemampuan Rudal Korea Utara.....	86



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asia Timur (*East Asia*) secara geografis adalah Jepang, China, Taiwan, dan kedua Korea. Tetapi selain faktor geografis, terdapat juga Rusia dan Amerika Serikat (AS) yang berkepentingan dan eksis di wilayah Asia Timur karena memiliki kepentingan strategis geopolitik yang besar di wilayah ini. Karena menurut Katzenstein dan Okawara, wilayah tidak hanya ditentukan secara geografis tapi juga dibangun secara politis. (104).

Masashi Nishihara mengatakan bahwa Asia Timur telah menjadi wilayah yang sangat penting bagi kedua negara *superpower*. Saat ini karena Rusia menganggap wilayah ini penting secara geostrategis, maka kepentingan AS di Asia Timur juga menjadi bertambah besar dari sebelumnya (5).

Wilayah Asia Timur adalah sebuah kawasan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat bagi dunia global karena terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi dan militer yang kuat: Rusia sebagai negara bekas Komunis terkuat yang akhirnya tumbang setelah era Perang Dingin, China sebagai raksasa dunia yang baru bangkit dan terus berkembang, Jepang sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat setelah dikalahkan sekutu pada akhir Perang Dunia II, Korea Selatan yang terus meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengimbangi persekutuanannya dengan Amerika Serikat (AS), dan Korea Utara yang dipimpin oleh pemerintah Komunis dengan kebijakan isolasinya.

Asia Timur juga memiliki sejarah yang rentan menimbulkan konflik akibat konfrontasi bipolar antara Barat dan Timur semasa Perang Dingin. Perang Dingin terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, ketika AS dan Uni Soviet berusaha memperluas pengaruh hegemoninya di dunia. Perpecahan di Semenanjung Korea juga terjadi akibat persaingan Barat dan Timur ini. Pihak Barat khawatir bahwa seluruh Asia akan dikuasai oleh Komunis, yang dipacu oleh munculnya RRC

sebagai negara baru yang menganut ideologi Komunis pada tanggal 1 Oktober 1949 (Irsan, *Hari-hari* 199,249,250).

AS dan Uni Soviet masing-masing berusaha melebarkan sayap hegemoninya dengan melakukan ekspansi dalam rangka mempertahankan eksistensi ideologi mereka di dunia. Sehingga pada masa Perang Dingin, Asia yang menjadi target penerapan persaingan hegemoni tersebut seperti terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang memihak Barat (AS) dan yang memihak Timur (Uni Soviet). Tetapi terdapat juga negara-negara non blok yang tidak memihak salah satu dari kedua kekuatan tersebut. Kemudian Perang Dingin berakhir ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet dan menjadikan AS sebagai satu-satunya negara adidaya yang berkuasa sampai sekarang.

Marie Soderberg berpendapat bahwa pada masa sekarang, di wilayah Asia Timur sudah tidak terjadi perang konvensional tetapi Perang Dingin dirasakan masih berlanjut (433). Ditambah lagi dengan timbulnya konflik-konflik akibat faktor sejarah yang menimbulkan *flash point*¹ yang telah terjadi cukup lama terjadi di kawasan ini:

1. Terjadinya *Security dilemma* di antara negara-negara Asia Timur: Negara-negara Asia Timur telah menghabiskan dana yang lebih banyak untuk pertahanan nasional khususnya sejak Perang Dingin berakhir, dana paling banyak digunakan untuk membeli dan menambah persediaan sistem persenjataan yang lebih canggih dan modern (Lee 157). Menurut Rousseau *security dilemma* adalah bila suatu negara menyediakan fasilitas untuk menjaga keamanan (*security*) negaranya sendiri akan dianggap sebagai keadaan yang tidak aman bagi negara yang lain (Holsti 67).
2. Hubungan Jepang yang tidak harmonis dengan negara tetangganya (China dan kedua Korea) karena kolonialisme yang dilakukan Jepang pada jaman dahulu dan tertutupnya sikap Jepang terhadap pengakuan tentang praktek kolonialisme tersebut.
3. Hubungan kedua Korea yang terus bersitegang akibat persekutuan Korea Selatan dengan AS dan Korea Utara yang didukung oleh dua negara besar

¹ *Flash Point* adalah sebuah situasi atau tempat dimana kekerasan dan kemarahan dimulai dan tidak dapat dikendalikan

China dan Rusia yang bertentangan dengan AS. China dan Rusia telah membantu pengembangan militer Korea Utara dan perbaikan infrastruktur ekonomi Korea Utara selama masa rekonstruksi pasca Perang Dingin (Lee dan Hyun Cho 134).

Mengingat banyaknya konflik yang terjadi di kawasan tersebut, maka pemerintah masing-masing negara diharapkan dapat berperan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. AS sebagai negara adidaya yang bersekutu dengan dua negara di Asia Timur (Jepang dan Korea Selatan), mengalami dampak langsung dari dinamika stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur.

Asia Timur merupakan wilayah yang penting secara geopolitik dan geostrategis untuk negara adidaya AS. Walaupun Perang Dingin telah berakhir, perbedaan ideologi antara AS dan Rusia, perlombaan senjata, dan tidak adanya *mutual trust* diantara kedua negara tersebut membuat hubungan mereka kurang harmonis dan penuh rasa curiga.

AS juga merasa tertekan dengan kebangkitan ekonomi China yang membuat negara tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat di negara-negara Asia lainnya. Perkembangan kekuatan militer China yang dinilai tidak transparan juga membuat khawatir pihak AS. Menurut *Annual Report on the Military Power of the People's Republic of China*, pengeluaran per tahun militer China mendekati enam puluh triliun dolar AS (tiga kali lipat dari jumlah yang diumumkan pemerintah China) (*East Asian Strategic Review* 185). AS juga mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir China yang akan membuat India tidak tinggal diam untuk memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan di kawasan Asia (Hendrickson 41).

Sebagai negara yang sangat menentang paham Komunisme, maka keberadaan Rusia, China, dan Korea Utara sebagai negara yang berbasis komunis dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi hegemoni AS. Maka dari itu, AS merasa perlu untuk mempunyai pengaruh hegemoni di Asia Timur. Salah satu usahanya adalah dengan mempertahankan negara-negara sekutunya di kawasan tersebut yaitu dengan Jepang dan Korea Selatan yang merupakan sekutu AS terbesar di Asia.

Buzan dan Waever mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan hebat memiliki jangkauan militer global. Mereka memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di dunia, mereka bisa campur tangan dalam kerumitan keamanan regional apapun ketika berkenaan dengan kepentingan-kepentingannya (33). Hal-hal yang disebutkan di atas sangat menggambarkan posisi AS sebagai satu-satunya *superpower* di dunia. AS memiliki jangkauan global karena pasukannya menyebar di berbagai belahan dunia, mereka dapat memproyeksikan kekuatannya di seluruh dunia, dan dapat campur tangan dalam masalah keamanan di sebuah wilayah jika menyangkut kepentingannya. Seperti yang AS lakukan di Semenanjung Korea terkait dengan isu nuklir Korea Utara.

Pasukan AS di Asia Timur terdapat di Jepang dan Korea Selatan, yang disiagakan untuk menghadapi kemungkinan bahaya atau ancaman yang datang dari Korea Utara, China, ataupun Rusia (Irsan, *Budaya* 91). Di Korea Selatan, pasukan AS, khususnya angkatan darat, ditempatkan sejak berakhirnya Perang Korea, sebagai pelaksana berlakunya kerja sama keamanan antara AS dan Korea Selatan (*United States-Republic of Korea Mutual Defense Treaty*) (Irsan, "Orientasi Pertahanan" 17). Pasukan AS di Jepang antara lain terdapat di Okinawa, pulau Honshu, Tokyo (Yokota, Zama, Yokosuka, dan Atsugi), prefektur Yamaguchi, Iwakuni, dan di pulau Kyushu (Hook 167).

Konflik dan ketegangan di Asia Timur yang sudah terjadi kemudian bertambah akibat praktek proliferasi nuklir Korea Utara. Masyarakat dunia berharap konflik di Semenanjung Korea segera berakhir dan damai dapat tercipta karena Semenanjung Korea dianggap *flash point* yang paling rentan menimbulkan konflik di wilayah Asia Timur Song (143). Krisis nuklir Korea Utara yang pertama pada tahun 1993 sampai dengan 1994, sedangkan krisis nuklir yang kedua dimulai pada tahun 2002 dimana Korea Utara dilaporkan telah mengembangkan kembali program senjata nuklirnya yang menggunakan bahan dasar uranium (Ashizawa 419).

Teknologi nuklir adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai pembangkit tenaga listrik, dalam bidang industri, bidang kesehatan, dan penelitian. Teknologi nuklir dipandang sebagai alternatif sumber energi akibat semakin menipisnya sumber

daya alam karena sifatnya yang *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui). Negara-negara di dunia yang mengembangkan teknologi nuklir adalah Inggris, Perancis, Rusia, China, AS, India, Pakistan, serta Korea Utara dan Iran yang mengundang kontroversi. Selain alternatif sumber energi, negara-negara tersebut juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan pertahanan keamanan negaranya.

Definisi senjata nuklir adalah adalah: "*a bomb, missile, warhead or other deliverable ordnance items (as opposed to an experimental device) that explodes as a result of energy released by atomic nuclei by fission, fusion or both*" (Wirengjurit 33). Terjemahan: sebuah bom, misil, hulu ledak, atau alat-alat lainnya dengan niat peluncuran tertentu (selain yang bersifat eksperimental) yang meledak sebagai hasil dari pelepasan energi dari atom nuklei melalui fisi, fusi atau keduanya.

Program proliferasi nuklir untuk kepentingan militer di negara manapun akan selalu menimbulkan kekhawatiran dan dinilai sebagai ancaman bagi keamanan regional maupun global. Suatu negara tidak akan tinggal diam apabila negara tetangganya menyatakan sedang menjalankan program pengembangan nuklir.

Dalam era nuklir sekarang ini, ancaman yang paling berbahaya adalah terjadinya perang nuklir antara bangsa-bangsa. Dalam kondisi perang nuklir, semua hal berharga seperti wilayah, populasi, kekuasaan, ideologi, dan ekonomi, dapat dihancurkan dalam hitungan hari atau bahkan dalam beberapa jam. Bahkan penambangan uranium sebagai bahan utama pengembangan senjata nuklir pun hanya bisa dilangsungkan apabila dinilai telah sesuai dengan traktat serta kesepakatan internasional yaitu Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir (*Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons*) yang dibuat pada tahun 1968. Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan untuk menggunakan bahan bakar nuklir hanya untuk tujuan damai dan didirikannya badan pengawas nuklir yaitu IAEA (*International Atomic Energy Agency*) yang akan memeriksa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk pengembangan teknologi nuklir tidak akan dialihkan untuk pembuatan senjata atau untuk senjata pemusnah massal (Holtsi 86, 384)). Karena apabila kecanggihan teknologi jatuh ke tangan yang salah untuk digunakan

dengan tidak bertanggungjawab, maka akan terjadi malapetaka yang sangat berbahaya bagi seluruh umat manusia.

Proliferasi nuklir adalah hal kontroversial dan rentan terhadap timbulnya konflik. Negara-negara besar yang mengembangkan nuklir merasa teknologi nuklir adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi masyarakatnya tetapi mereka mengkhawatirkan proliferasi nuklir yang dilakukan oleh negara-negara lain selain mereka.

Adalah hak bagi semua bangsa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti untuk proliferasi nuklir asalkan akan berguna bagi masyarakatnya. Seperti yang tersirat dalam perkataan Presiden Mahmoud Ahmadinejad yang bersikeras bahwa Iran berhak mengembangkan teknologi nuklir layaknya bangsa Eropa:

Jika nuklir ini dinilai jelek dan kami tidak boleh menguasai dan memilikinya, mengapa kalian sebagai adikuasa memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami tidak boleh juga memakainya? (Muhsin Labib, 6).

Korea Utara menyita banyak perhatian karena uji coba senjata nuklir yang membuat dunia internasional merasa terancam dengan sifat pembakangnya terhadap para pengawas internasional. Pada tahun 1994 Korea Utara menolak kehadiran petugas pengawas dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memiliki akses ke wilayah yang diduga sebagai lokasi pengembangan senjata nuklir (Oberdorfer 169), kemudian menarik dirinya dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir ("Sikap Korut" 1).

Korea Utara juga telah melakukan percobaan nuklir tipe Nodong (jarak tempuh 1500 km) dan Taepodong 1 (jarak tempuh 1500 km) pada tahun 1998 yang melewati wilayah Jepang dan jatuh di Lautan Pasifik. Kemampuan rudal Korea Utara ini sangat mengkhawatirkan Jepang karena dapat memuat kandungan peledak berisi bahan kimia atau biologi (Irsan, *Hari-hari* 451).

Upaya-upaya Korea Utara untuk menciptakan senjata nuklir melalui percobaan peluncuran roket, rudal, atau misilnya telah membuat kawasan Asia Timur bahkan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan global yang sangat serius. Korea Utara juga dinilai sebagai pemerintah yang tidak

bertanggungjawab karena lebih mementingkan program nuklir yang memakan biaya besar dibanding memperhatikan rakyatnya yang semakin miskin dan kelaparan. Pemerintahan Korea Utara yang berbasis Komunis ini juga dianggap sulit berkompromi terhadap dunia internasional yang berkepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Marie Sodergerb berpendapat bahwa menciptakan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah sesuatu yang kompleks karena posisi geografis wilayahnya dan sejarah campur tangan yang konstan dari beberapa negara tetangga; hal ini telah menimbulkan kultural strategis untuk bertahan hidup pada masing-masing negara (*nationalistic survival*) (447).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka yang menjadi masalah penelitian adalah: Bagaimana kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya.

Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan. Permasalahan yang dibahas juga hanya dibatasi dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Jepang selama tahun 2002-2009. Kronologi sebelum masa tersebut hanya menjadi data-data yang mendukung penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara tersebut.

1.4 Kemaknawian Penelitian

Penelitian tentang diplomasi Jepang terhadap Korea Utara sudah banyak dilakukan hingga saat ini. Karena letak geografis yang dekat dan adanya faktor historis, menyebabkan terjadinya berbagai hal dan konflik di antara kedua negara.

Jepang yang dikenal sebagai negara berkepribadian unik akibat latar belakang historis yang cukup beragam, terkesan memiliki diplomasi yang dipengaruhi oleh budaya dan sejarahnya. Di sinilah penelitian interdisipliner diterapkan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang kedua negara tersebut dan berguna sebagai informasi atau data pendukung untuk penelitian lain yang membahas tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara lain selain Korea Utara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer yaitu buku-buku dan sumber data sekunder yaitu artikel-artikel di internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua data yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian diteliti dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri dan diplomasi Jepang telah dilakukan sebelumnya dengan judul *Diplomasi Jepang dalam Menghadapi Masalah Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara* oleh Leny Wahyura. Penelitian tersebut menganalisis tentang kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu penculikan. Memiliki kaitan dengan isu nuklir tetapi data mengenai isu nuklir hanya sebagai data pendukung. Penelitian lain mengenai kebijakan luar negeri dan diplomasi Jepang adalah *Kebijakan Luar Negeri Jepang dalam Hubungannya dengan Korea Utara periode 2001-2003* oleh Inda Mole Mutia. Penelitian tersebut menganalisis seluruh kebijakan luar negeri Korea Utara baik isu nuklir maupun isu penculikan dalam kurun waktu tiga tahun. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih memfokuskan pada kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir dan dengan periode yang lebih panjang yaitu 2002-2009.

1.7 Kerangka Teori

Jepang sebagai negara yang tidak kaya sumber daya alam tentu membutuhkan bantuan impor bahan bakar energi dan bahan tambang lain yang tidak tersedia di negaranya. Walaupun sumber daya manusia Jepang memiliki kualitas yang tinggi dilihat dari etos kerja dan teknologi yang diciptakan bangsa ini, kebutuhan kehidupan bangsanya tidak akan terpenuhi tanpa adanya sumber daya alam.

Jepang menyadari bahwa banyak persoalan yang dihadapi pemerintahannya akibat kondisi alam negara tersebut. Negara ini tidak memiliki sumber daya alam sendiri, oleh karena itu Jepang banyak tergantung pada sumber-sumber dari negara lain. Bahkan hampir delapan puluh lima persen sumber tenaganya berasal dari negara lain (Seng 11). Jepang adalah negara industri yang mengimpor sumber-sumber bahan mentah industri negara lain, seperti minyak mentah, baja, besi, logam, air raksa, batu kawi, timah, dan khrom dalam jumlah besar. Selain itu Jepang juga mengimpor nikel, kobalt, dan bauksit yang tidak ditambang di Jepang, serta mineral non-metalik seperti batu fosfat, magnestik yang juga harus diimpor dalam jumlah besar. Begitu juga dengan fiber alami seperti katun dan wool juga didapatkan melalui impor (Hadi dan Dharmastuti 28).

Posisi geografis dan keadaan alam Jepang menjadi kelemahan Jepang sehingga pemerintahan Jepang harus menjalankan praktek diplomasi dengan kebijakan luar negeri yang tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Berbagai kelemahan yang dimiliki Jepang disadari oleh orang-orang Jepang sendiri sehingga mereka memiliki apa yang disebut dengan *sense of survival* (insting bertahan). Orang-orang Jepang berusaha bertahan untuk hidup dan menjaga kelangsungan kehidupannya dengan mengupayakan berbagai cara yang diperlukan.

Sejak zaman dahulu, bangsa Jepang sudah melakukan usaha-usaha untuk bertahan hidup dari keadaan alam yang tidak menguntungkan. Manchuria dan Mongolia pernah mengalami kolonialisme Jepang dan tereksplorasi sumber-sumber alamnya, tambang-tambang batu bara yang utama di China juga pernah berada di bawah kontrol Jepang (Cleary 13).

Jepang juga melakukan usaha untuk mempertahankan negaranya berdasarkan *sense of survival* dengan berusaha mensejajarkan diri dengan dunia Barat agar tidak direndahkan martabat dan harga diri bangsanya. Contohnya ketika terjadi restorasi Meiji di mana Jepang melakukan perubahan dan perbaikan secara besar-besaran dan menyeluruh agar menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih dihormati dengan berorientasi pada Barat.

Pada saat restorasi Meiji, pemerintah baru Jepang melakukan modernisasi terhadap organisasi sosial dan politik negara berdasarkan prinsip kapitalisme modern yang berorientasi kepada negara Barat yaitu Perancis dan Inggris sebagai negara kapitalis maju pada saat itu. Mulai tahun 1869 pemerintah Jepang menerjemahkan kitab undang-undang Perancis untuk dijadikan hukum umum di negaranya (Noda 42-43). Kaisar Meiji ingin supaya Jepang tidak menjadi obyek imperialisme oleh negara-negara Barat tetapi sebaliknya ingin diakui sebagai negara industri sebagaimana nagara-negara Barat. Berawal dari situ diterapkan kebijaksanaan untuk mengintrodusir hukum yang dikenal seperti di negara-negara Barat, selain memajukan perekonomian negara dan dibangun berbagai macam industri yang menjadikan Jepang sebagai negara kapitalis. Selain itu, pemerintah Meiji juga melakukan usaha mensejajarkan diri dengan Barat melalui pengiriman staf pengajar dan pegawai pemerintahan keluar negeri untuk belajar bahasa dan hukum disana, kemudian sekembalinya mereka dari luar negeri mereka ditugaskan untuk membuat hukum modern berdasarkan hukum negara yang mereka pelajari. Ahli hukum dari negara lain yang dianggap memiliki sistem hukum yang maju juga kerap diundang ke Jepang untuk merancang hukum yang diperlukan di Jepang (Juwana 1-2).

Tokutomi Soho, salah satu tokoh penting restorasi Meiji, mengatakan bahwa pemuda-pemuda Jepang harus mencari dan menemukan Westernisasi masyarakat Jepang secara menyeluruh agar Jepang dapat menjadi sebuah negara industri kuat yang menyamai kekuatan Barat (Pyle 5-6). Bahkan politikal dan sistem legal di Jepang pada abad ini telah dua kali disusun berdasarkan purwarupa² Barat (Hendry 187).

² *prototype*

Abdul Irsan menyatakan bahwa bangsa Jepang sepanjang sejarahnya, telah melakukan tindakan dan upaya berdasarkan *sense of survival* mereka dengan berorientasi ke Barat dalam rangka mensejajarkan diri agar merasa sederajat dan diakui dunia luar. Sehingga pada masa sekarang Jepang merupakan negara Asia pertama yang berhasil mengembangkan diri menjadi negara modern yang memiliki kemajuan sejajar dengan Barat (Irsan, *Budaya* 28). Dengan usahanya yang selalu mensejajarkan diri dengan budaya lain yang dianggap lebih modern telah membentuk Jepang menjadi negara yang kuat seperti sekarang.

Menurut Masataka Kosaka, bangsa Jepang sangat baik dalam menyerap dan mengasimilasi kebudayaan asing (226). Jepang telah dibentuk oleh sejarah yang berkesinambungan. Berbagai kejadian di masa lampau telah membentuk karakter bangsa Jepang pada masa sekarang ini, salah satunya adalah dimana Jepang memutuskan untuk bertindak mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti contoh-contoh di atas agar menyelamatkan eksistensi bangsanya. Hal tersebut telah menyebabkan Jepang dapat bertahan di tengah globalisasi yang sarat dengan neo-kapitalisme dan neo-liberalisme dengan bertindak berdasarkan *sense of survival*. *Sense of survival* inilah yang juga mendasari terciptanya berbagai kebijakan luar negeri Jepang pada masa sekarang dalam menghadapi berbagai masalah regional maupun global dengan memprioritaskan tercapainya kepentingan nasional negaranya.

Setiap negara di dunia dalam praktek pemerintahannya selalu memprioritaskan kepentingan nasional dan selalu menjalankan segala cara untuk memenuhi kebutuhan domestik serta selalu bersaing untuk memiliki pengaruh permanen di kancah politik global. Setiap pemerintah negara manapun selalu berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi kepentingan bangsa dan negaranya. Kepentingan nasional yang ingin dicapai setiap negara tentu berbeda berdasarkan kondisi dan kebutuhan negara masing-masing. Dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya, sebuah negara menggunakan diplomasi untuk mencapai keuntungan-keuntungan bagi negaranya.

Definisi diplomasi menurut KM Panikkar adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Selain definisi ini, terdapat juga definisi lain tentang diplomasi menurut John H Barton, yaitu alat

perdamaian dan usaha penyelesaian tanpa perang (34). Tujuan utama dari diplomasi yang efektif adalah untuk pengamanan kepentingan negara sendiri dan untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri (Roy 5-6).

Di dalam praktek diplomasi, sebuah negara menciptakan kebijakan luar negeri sebagai komponen penting yang mendukung proses tercapainya kepentingan nasional negara tersebut. Definisi kebijakan luar negeri atau *foreign policy* menurut KJ Holsti adalah:

Ideas or actions designed by policy makers to solve a problem or promote some change in the policies, attitudes, or actions of another state or states, in nonstate actors, in the international economy, or in the physical environment of the world (82).

Terjemahan: Ide atau tindakan yang diciptakan oleh para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah atau meningkatkan perubahan di dalam kebijakan-kebijakan, perilaku-perilaku, atau tindakan-tindakan dari satu negara atau lebih, melalui aktor non-negara, ekonomi internasional, ataupun dalam lingkungan fisik di seluruh dunia.

Berikut ini adalah definisi lain dari kebijakan luar negeri menurut Christopher Hill: "*The sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international relations*" (3). Terjemahan: Inti dari hubungan-hubungan eksternal resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam hubungan-hubungan internasional. Ia juga menyebutkan tujuh harapan pokok dari kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Melindungi warga negara yang ada di luar negeri
2. Membuat proyek dalam rangka menyebarkan dan memperkenalkan identitas negaranya ke luar negeri
3. *Homeostatis*, atau memelihara kesatuan teritori negaranya dan menjaga kedamaian negara dari ancaman pihak luar
4. *Advancing Prosperity*, adanya harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar mempromosikan ke dunia internasional bahwa negara mereka sejahtera secara ekonomi
5. Membuat keputusan dalam campur tangan negaranya di dunia luar.
6. Menegosiasikan perintah internasional yang stabil

7. Melindungi kebiasaan umum (33).

Berdasarkan harapan pokok *homeostatis*, kebijakan luar negeri selain dibuat untuk mendapatkan kepentingan nasional maksimal juga merupakan salah satu faktor yang bertujuan untuk mendukung pertahanan dan keamanan atau *security* yang bertujuan untuk menjaga kedamaian negara dari ancaman pihak luar.

Berikut ini adalah definisi *security*: “*Security is a state of being in which an individual or a community -or even a country- feels free from any fear or threat*” (Anwar 26). Terjemahan: “Sekuritas atau keamanan adalah sebuah keadaan dimana sebuah individu atau komunitas -atau bahkan sebuah negara- merasa bebas dari ketakutan atau ancaman apapun.” Dan sebagai kebutuhan dasar dalam kehidupan, *security* adalah hal yang sangat penting bagi eksistensi makhluk hidup (Anwar 26). *Security* juga bukan hanya ditujukan bagi kelangsungan negara saja tetapi juga menjadi kebutuhan bagi semua aktor lainnya termasuk individu (Hermawan 39).

Security adalah salah satu tujuan umum setiap pemerintahan selain hal penting lainnya yaitu otonomi, kesejahteraan, serta status dan *prestige*. *Security* dilakukan karena adanya *threat* (ancaman). *Threat* bisa berupa pengambilan wilayah, serangan senjata dari negara tetangga, atau penguasaan atas aset teritorial strategis (Holsti 83,85). Dalam isu nuklir Korea Utara, Jepang membuat kebijakan-kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara karena mengalami adanya *threat* jenis kedua yaitu serangan senjata. Jepang merasa terancam karena berbatasan langsung dengan Korea Utara dan uji coba peluru nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut dapat menjangkau wilayah Jepang.

Berikut adalah pernyataan pemerintah Jepang yang tertulis dalam *Diplomatic Blue Book 2002*:

Nuclear, biological, chemical, and other weapon of mass destruction comprise a major threat when they are coupled with means of delivery that provide high military utility. The trend toward the wider global proliferation of ballistic missiles as vehicles to deliver weapons of mass destruction now poses a grave threat to international peace. For example, North Korea's ballistic missile activities whose range covers Japanese territory imply an immense threat to Japan's security (109).

Terjemahan: Nuklir, biologis, kimia, dan senjata pemusnah massal lainnya membangkitkan sebuah ancaman besar bila dipasangkan dengan tujuan-tujuan pelepasan yang mengandung peralatan militer yang canggih. Kecenderungan terhadap proliferasi global dari misil balistik sebagai wahana untuk melepaskan senjata-senjata pemusnah massal saat ini menjadi ancaman keras bagi perdamaian internasional. Contohnya aktifitas misil balistik Korea Utara yang jangkauannya meliputi wilayah Jepang menyiratkan ancaman nyata bagi keamanan Jepang.

Unsur penting dalam kajian *security* adalah persepsi akan ancaman yang menimbulkan perasaan tidak nyaman (*insecurity*). Yang dianggap sebagai ancaman keamanan (*security threat*) bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut (Anwar 27).

Menurut Daniel S Pap, persepsi mengandung tiga buah komponen yang terpisah, yaitu *values*, *beliefs*, dan *cognition* (nilai, keyakinan, dan pengamatan). *Values* memberikan tingkat dan urutan kepada kondisi, situasi, individual, dan objek. *Beliefs* adalah penerimaan dari deskripsi khusus dari kenyataan sebagai kebenaran atau logis. Sedangkan *cognition* adalah bagian apapun dari informasi yang diterima oleh para pengamat tentang lingkungan sekitar mereka yang dicapai pada suatu *values* atau *beliefs*. Melihat dan merasakan kondisi tertentu adalah masukan bagi *cognition* (199-200).

Dalam rangka menciptakan perdamaian, Jepang harus memperkuat stabilitas, dan kerja sama internasional dengan menjalankan diplomasi multilateral yang aktif dalam skala global melalui kerja sama dan dialog (Japan Institute of International Affairs 72). Karena ancaman nuklir Korea Utara dapat diatasi tidak hanya dengan meningkatkan kekuatan pertahanan Jepang dan memperkuat aliansi pertahanan Jepang-AS, tetapi juga dengan mengupayakan dialog bersama Korea Utara (Virgianita dan Rakhmatia 48). Menghadapi isu nuklir Korea Utara, Jepang melakukan pendekatan multilateral dengan proses negosiasi melalui *Six Party Talks*.

Berikut ini adalah definisi multilateral menurut John G Ruggie: *is an institutional form that coordinates relations among three or more states on the basis of generalized principles of conduct* (Takeshi 66). Terjemahan: sebuah

bentuk institusi yang mengkoordinir hubungan-hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan aturan-aturan terapan yang sama. Proses negosiasi antara dua pemerintahan atau lebih, bertujuan untuk mengubah atau mendukung objektif dan kebijakan satu sama lain agar mencapai kesepakatan mengenai beberapa isu perdebatan (143).

Menurut Michael K Blaker, Jepang secara singkat telah menunjukkan gaya negosiasi yang berbeda dan berkelanjutan di dalam berbagai kondisi internasional dan domestik yang sangat berbeda-beda; serta dalam setiap konteks negosiasi selalu berusaha untuk menghindari konfrontasi terbuka, mengurangi resiko, dan melindungi dirinya dari potensi serangan atau kritik (56, 60). Dalam menghadapi Korea Utara, Jepang menggabungkan kebijakan melalui “dialog dan tekanan”, tetapi karena perkembangan tentang isu ini semakin terhambat sejak 2004 maka Tokyo lebih memilih kebijakan dengan tekanan kepada Korea Utara (“Diplomacy on” 1).

1.8 Sistematika Penulisan

Selanjutnya dalam penulisan ini dibagi ke dalam empat bab yang terdiri dari:

BAB I yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kemaknawian penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka teori, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang sejarah Korea Utara dan dinamika isu nuklir Korea Utara, serta proses *Six Party Talks* sebagai upaya diplomasi internasional untuk menghadapi isu nuklir Korea Utara.

BAB III membahas mengenai analisis kebijakan luar negeri yang diterapkan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara.

BAB IV adalah kesimpulan akan permasalahan penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

SEJARAH DAN DINAMIKA ISU NUKLIR KOREA UTARA

2.1 Bagaimana Semenanjung Korea Terpecah Menjadi Utara Dan Selatan

Pada 1 Desember 1943, AS, Inggris dan China mengeluarkan Deklarasi Kairo, yang menyatakan bahwa Korea akan mendapatkan kembali kemerdekaannya “dalam tempo sesingkat-singkatnya”. Jangka waktu kemerdekaan yang tak pasti tersebut menimbulkan kekhawatiran pada pemerintah provinsional Korea –yang bersamaan dengan jatuhnya Shanghai ke tangan Jepang telah merelokasi diri ke Chungking di barat daya China– dan membuat mereka semakin condong pada pemerintah AS demi kejelasan statusnya. Washington menolak memberikan jawaban, dan lebih lanjut menyatakan pada pemerintah provinsional Korea bahwa ada sesuatu hal yang masih belum terselesaikan. Sekitar dua tahun kemudian, jelaslah apa yang sebenarnya telah direncanakan oleh AS dan Inggris terhadap Semenanjung Korea. Dalam Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945, dimana terjadi pertemuan bersejarah antara Presiden Franklin D. Roosevelt dengan pemimpin Soviet Joseph Stalin, Roosevelt mengajukan agar dibentuk perwalian empat kekuatan –yaitu AS, Inggris, Uni Soviet dan China– untuk diterapkan di Korea.

Stalin setuju untuk memimpin, dan pada 8 Agustus 1945 –atas desakan pemerintah AS– Uni Soviet memasuki perang melawan kekaisaran Jepang, demi janji untuk mendukung kemerdekaan Korea. Pada 9 Agustus, pasukan Soviet bersama sebuah kontingen asing Komunis-komunis Korea, memasuki kawasan utara Korea.

Dua hari kemudian, tanggal 11 Agustus, AS menyusun Perintah Umum no.1 yang menetapkan bahwa pasukan Jepang yang berada pada 38⁰ Lintang Utara (paralel ke 38) agar menyerah kepada Uni Soviet, sementara mereka yang berada pada sisi Selatan paralel ke 38 tersebut agar menyerah pada kekuatan AS. Kremlin tidak menyatakan keberatan pada perintah tersebut, dan pada 8 September pasukan AS bergerak maju ke belahan selatan Korea. Tepat keesokan harinya, kekuatan Jepang di Korea menyerah di kota Seoul. Pada saat itu pula kekuatan

Soviet telah memulai penutupan kawasan utara Korea, bermula dari paralel ke 38.

Di kawasan selatan, rakyat Korea telah membentuk Komite Persiapan Kemerdekaan Korea pada bulan Agustus 1945, dan pada 6 September Komite itu telah mengadakan sidang nasional dimana para delegasi memproklamkan Republik Rakyat Korea. Pemerintahan AS di kawasan selatan menolak mengakui republik bentukan forum tersebut, dan tidak pula mengakui pemerintah provinsional yang baru kembali dari pembuangan di China; sebagai pemerintah berdaulat Korea. Gedung Putih malah mengejar rencananya untuk mengatur Korea melalui perwalian empat kekuatan –yaitu AS, Inggris, Uni Soviet dan China– serta mencapai persetujuan resmi dari negara-negara terkait pada Konferensi Moskow di bulan Desember 1945. Berita mengenai perwalian tersebut membangkitkan amarah rakyat Korea, dan untuk menenangkan situasi maka pemerintahan militer AS membentuk Dewan Perwakilan Demokratik, yaitu sebuah badan penasehat yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengaruh di Korea. Jabatan ketua diduduki oleh Syngman Rhee, mantan presiden pemerintah provinsional Korea.

Di belahan utara, pihak berwenang Soviet yang menduduki wilayah itu telah mengizinkan kelompok warga asing yang tergabung dalam Komunis-komunis Korea untuk membentuk Komite Provinsional Rakyat Untuk Korea Utara, sebuah pemerintahan terpusat yang meniru sistem politik Soviet, dimana pemimpin gerilya Kim Il Sung ditampuk sebagai ketua. Setelah Komisi Gabungan AS-Republik Sosial Uni Soviet –yang ditetapkan di Konferensi Moskow– tidak menunjukkan kemajuan pada isu penyatuan Korea, maka AS mengajukan hal ini kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di tahun 1947. Majelis Umum PBB merespon dengan mengambil sebuah resolusi berupa pemilihan umum di Korea yang diawasi oleh Komisi Sementara PBB Untuk Korea.

Kawasan selatan menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 10 Mei 1948; yang segera membentuk lembaga konsitusi, dan memilih Syngman Rhee sebagai presiden pada 20 Juli. Tanggal 15 Agustus 1948, Republik Korea pun diproklamkan dengan ibukota Seoul, dan pemerintahan militer AS berhenti beroperasi di kawasan selatan Korea tersebut. Hal yang sebaliknya terjadi di belahan lain Korea. Uni Soviet telah melarang Komisi Sementara PBB Untuk

Korea memasuki kawasan utara. Kim Il Sung ditunjuk sebagai Perdana Menteri (kediktatorannya, kepribadiannya yang nyata-nyata haus akan kekuasaan, berlangsung hingga kematiannya di tahun 1994), dan pada tanggal 9 September 1948, Republik Rakyat Korea pun diresmikan; dengan Pyongyang sebagai ibukota (Novas, Cao, dan Silvas 172-174).

2.2 Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

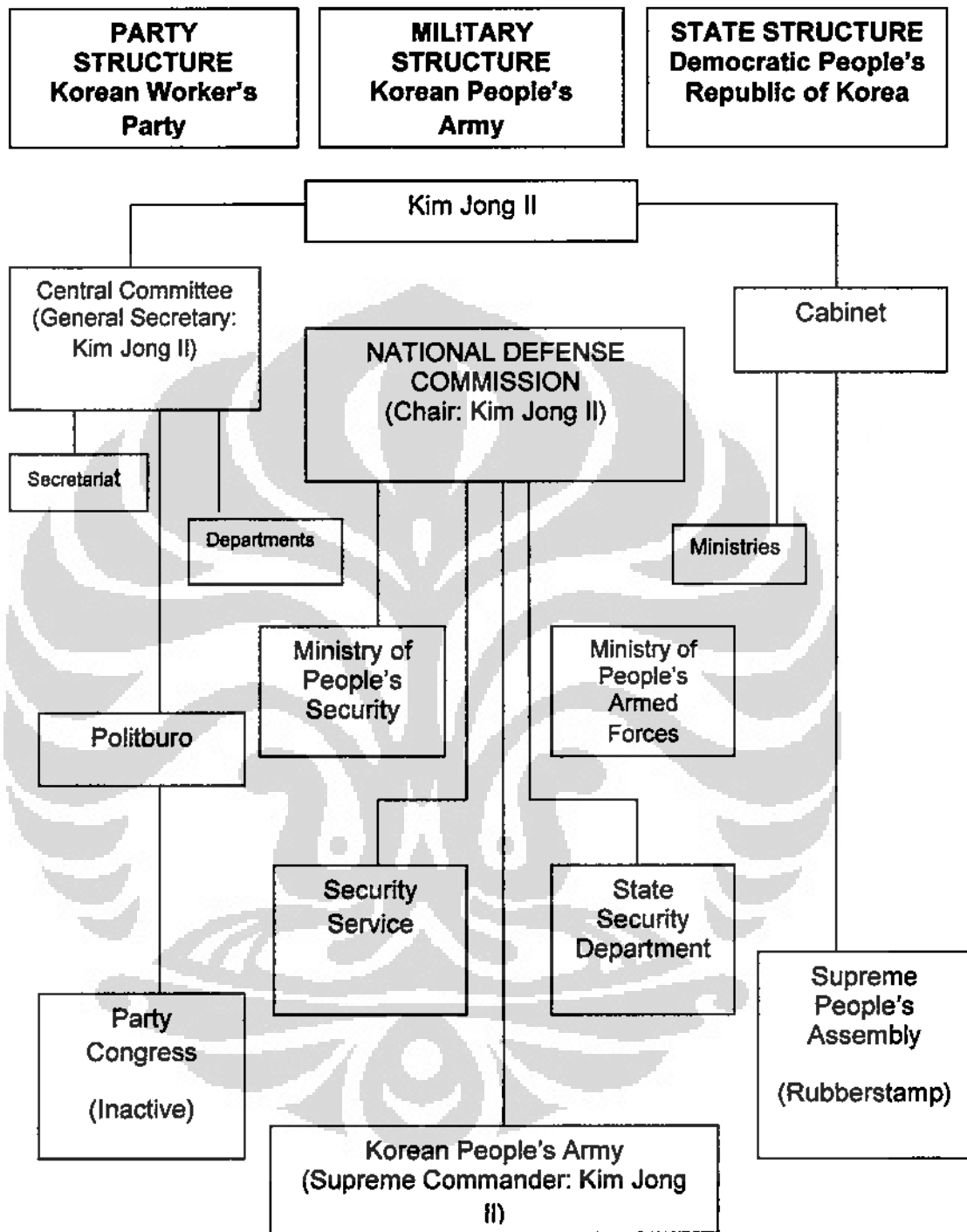
Mengikuti kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi dua kawasan. Rusia memihak pada sisi utara dari garis paralel ke 38, dan AS mengatur sisi selatannya. Saat kedua pihak sebenarnya telah setuju bahwa tujuan akhir adalah Korea yang merdeka dan bersatu, tensi-tensi perang dingin yang meningkat menunjukkan tujuan tersebut tak akan tercapai. Dengan Kim Il Sung sebagai klien, sejak tahun 1947 seterusnya USSR melanjutkan untuk menciptakan negara komunis yang tersentralisir di Utara. Kim Il Sung secara progresif menghancurkan musuh-musuhnya dalam pergerakan-pergerakan komunis dan nasionalis yang semakin meluas di Utara. Pada 9 September 1948, DPRK atau Korea Utara pun diproklamkan. Setelah dilarang di Selatan pada awal tahun 1948, sebagian besar kaum komunis berpindah ke Utara. Penggabungan partai-partai komunis dari kedua kawasan menghasilkan penciptaan Partai Pekerja Korea (*Korean Worker's Party*). Di akhir 1950-an, barulah Kim Il Sung berhasil menerapkan supremasi lengkap pada kedua partai dan negara, menetapkan dasar pada apa yang akan menjadi kepribadian pemujaan ekstrim terhadap seorang pemimpin modern (Lunn 8).

Korea Utara mempunyai luas wilayah 120.540 km² dan jumlah penduduk 22.224.195 jiwa (Diananwati 29). Pemimpin pertama Korea Utara adalah pendiri negara tersebut, Kim Il Sung yang memimpin negaranya dari sejak didirikannya DPRK sampai ia meninggal pada tanggal 7 Juli 1994, pada usia 82 tahun. Sampai saat ini, Kim Il Sung sangat dihormati di negaranya. Di daerah Masudae terdapat patung Kim Il Sung setinggi 20 meter dan orang-orang yang melintas di sana termasuk para wisatawan asing harus berdiri sejajar dan memberi hormat pada patung tersebut. ("Korea Utara" 60).

Pada tahun 1973, Kim Il Sung mengangkat putranya, Kim Jong Il sebagai calon penggantinya. Sebagai persiapannya, Kim Jong Il ditempatkan pada sebuah pos Divisi Kepemimpinan Komite Sentral Partai Buruh. Baru setelah 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994, Kim Jong Il menggantikan posisi ayahnya sebagai orang nomor satu di Korea Utara. Kepemimpinan partai meningkat menjadi termiliterisasi dengan diangkatnya para petinggi angkatan bersenjata yang memihak Kim Jong Il. Ia yang mempunyai panggilan "Pemimpin Tercinta" sekarang telah berusia 67 tahun, pernah diberitakan terserang stroke beberapa waktu lalu tetapi ia tetap dicitrakan masih sangat berkuasa. Pada Februari 2009, Kim Jong Il menunjuk putra bungsunya Kim Jong Un atau Kim Woo yang kini berusia sekitar 26 tahun, sebagai penerus kepemimpinan ayahnya, kemudian pada April 2009 ia diangkat untuk menduduki jabatan di Komisi Pertahanan Nasional ("Misteri Sukses" 5; Lunn 8).

Kim Il Sung tetap menjadi dewa di Korea Utara pada abad ke 21 dan kritik atau peninjauan kembali tentang kebijakan pemerintahnya sama sekali tidak terpikirkan. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang mencoba mengkritik atau menantang warisannya karena, dari segala segi, ia tetap secara universal menjadi acuan warga Korea Utara, termasuk para lawannya. Lebih jauh lagi, peninjauan kembali resmi apapun terhadap Kim Il Sung secara ekstrim tidak pernah terpikirkan karena rezim yang memerintah dipimpin oleh putranya. Pyongyang adalah rezim birokratik militer terorganisir yang sangat tersentralisir di sekeliling seorang pemimpin yang sangat berkuasa. Korea Utara memiliki seorang diktator absolut dan partai rakyat, ideologi yang kuat, dimana rakyatnya hidup dalam kondisi teror di bawah kekuasaan dari sebuah perangkat pemaksaan yang represif dengan ekonomi tersentralisir, dan rezim yang mengupayakan nyaris kendali total atas media-media komunikasi massal (Scobell vi, 1, 3).

Gambar 2.1 Struktur Partai-Militer-Negara Korea Utara



Sumber: Scobell, Andrew. *Kim Jong Il and North Korea: The Leader and The System*: 5

Pemerintah Korea Utara telah menutup secara ketat akses terhadap dunia luar, dan menahan serta menyiksa rakyatnya yang membangkang atas kebijakannya tersebut (“Kisah Malang” 8). Bahkan sampai sekarang pun, pemerintah komunis tersebut masih membatasi rakyatnya dari kontak dengan dunia luar, yaitu dengan membatasi penggunaan ponsel untuk memblokir penyebaran informasi mengenai krisis makanan di negara tersebut. Para pendatang atau turis yang masuk ke Korea Utara pun diharuskan menyerahkan ponsel mereka, dan akan dikembalikan ketika akan keluar dari wilayah Korea Utara. Dan mulai awal tahun 2009, pemerintah Korea Utara akan mengeluarkan layanan ponsel yang hanya menyediakan saluran telepon dalam negeri, pemilik ponsel tidak akan bisa melakukan sambungan telepon internasional (“No Cell Phone” 12).

Keterpurukan ekonomi Korea Utara dimulai ketika Korea Utara tidak mampu untuk melunasi pinjaman negaranya dan hal tersebut telah berpengaruh pada banyak hal, termasuk kesulitan bersaing dengan Jepang dan negara-negara macan Asia lainnya dalam persaingan ekspor ke AS dan Eropa Barat, kurangnya pengetahuan manajerial tentang penggunaan mesin-mesin impor berteknologi tinggi, serta kondisi dimana sumber daya manusia Korea Utara tidak terbiasa dengan resiko-resiko dalam pasar keuangan internasional. Faktor-faktor tersebut di atas telah menyebabkan rezim Korea Utara tidak dapat menyokong pertumbuhan ekonomi di tahun 1980-an dan seterusnya. Akibat masa lalu pemimpinnya yang cenderung menciptakan kebijakan yang justru membebani negara dan rakyatnya sendiri, Korea Utara sekarang adalah negara yang ketinggalan dalam persaingan pembangunan dan harus menyerap teknologi dengan kecanggihan tinggi serta mengundang investasi asing (Hale 385, 399).

Selain mengalami kekurangan yang dimiliki negaranya yaitu miskin sumber daya, terisolasi dari dunia internasional, serba tertinggal dalam pembangunan, ekonomi, dan teknologi, Korea Utara juga mengalami berbagai bencana alam serta menderita kelaparan yang semakin menyebar di seluruh negeri. Rakyat Korea Utara hidup dengan menerima bantuan yang diterima pemerintahnya dari bantuan negara-negara lain seperti AS, Jepang, China, dan Rusia. Rakyat Korea Utara mendapat jatah beras gratis sebanyak 700 gram sehari (“Korea Utara” 61).

Organisasi-organisasi bantuan internasional melaporkan bahwa antara 2 hingga 3,5 juta warga Korea Utara (dari populasi 24 juta orang) telah meninggal akibat kelaparan atau penyakit-penyakit akibat kelaparan sejak tahun 1995. Diperkirakan lebih dari 60 persen anak-anak Korea Utara dibawah usia tujuh tahun telah mengalami hambatan tumbuh dan menghadapi masalah-masalah perkembangan mental. Skala kelaparan di Korea Utara digambarkan sebanding dengan yang terjadi di Ethiopia pada pertengahan 1980-an dan di Somalia di awal 1990. Menurut ahli gizi Esko Koskinen, yang menghabiskan enam bulan di Korea Utara pada 1997-1998 bekerja untuk Badan Pangan Dunia (FAO), efek kehancuran dari kelaparan di Korea Utara tidak terlihat sejelas yang terjadi pada negara-negara Afrika karena anak-anak Korea Utara tidak meninggal di tepi jalan, namun di balik dinding-dinding tempat pengasuhan. Gerakan Buddhisme Korea yang berbasis di Seoul, yang membantu pelarian Korea di Timur Laut China sejak bulan Desember 1996, memperkirakan 300.000 hingga 400.000 warga Korea Utara menyeberangi perbatasan pada 1998 untuk mencari makanan. Sebagian besar kembali pulang setelah menyimpan makanan yang disediakan oleh organisasi-organisasi penolong dan para donor berkebangsaan China-Korea atau makanan yang dibeli dengan uang yang didapat dari menjual barang-barang di pasar-pasar China. Diduga sekitar 100.000 warga Korea Utara telah tinggal di China sebagai pengungsi ilegal (Jakobson 9).

Walaupun mengalami kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan sangat tergantung dari bantuan pihak lain, Korea Utara tetap memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan militer negaranya. Usahnya antara lain adalah: membangun instalansi militer di bawah tanah dan memproduksi berbagai bentuk senjata pemusnah massal seperti rudal balistik, senjata nuklir, senjata biologi/kimia (Irsan, *Budaya* 167-168). Jumlah anggota militer Korea Utara sekitar lima persen dari jumlah penduduk atau sekitar 1,1 juta orang. Mereka memiliki seratus ribu pasukan khas dengan persenjataan dan latihan khusus serta memiliki keahlian sabotase dan perang gerilya (Irsan, *Hari-hari* 446-447).

Korea Utara mulai menciptakan senjata sederhana di akhir tahun 1960 dan mampu mengembangkan jenis-jenis yang lebih canggih secara massal pada dua dekade berikut; diantaranya adalah peluncur roket 107-mm, senjata 37-mm anti

pesawat terbang, tank dan kendaraan pengangkut personil, berbagai misil dan peluru kendali, serta artileri angkatan laut. Secara singkat, industri pertahanan Korea Utara telah berkembang menjadi fasilitas produksi senjata yang dewasa; mencukupi segala kebutuhan akan persenjataan modern dan canggih untuk keperluan darat dan laut. Walaupun perkembangan sistem teknologi canggih Korea Utara masih belum memadai, namun kondisi tersebut dikompensasi oleh produksi kapasitas besar untuk berbagai kebutuhan (Kwan-Chi 92-93).

Korea Utara memiliki tambang uranium alami dengan jumlah kandungan yang cukup banyak yaitu empat juta ton, jika Korea Utara terus mengembangkan uraniumnya dan berhasil maka ia akan dapat menciptakan senjata nuklir yang tidak terbatas (Nam 88). Berdasarkan laporan CIA dan intelijen Departemen Pertahanan AS, tahun 1993 saja Korea Utara berhasil memurnikan 12 kg plutonium. Cukup untuk membuat dua bom atom. Produksi plutonium Korea Utara diperkirakan bertambah 25 kg-30 kg hingga tahun 2003. Untuk satu bom atom dibutuhkan sedikitnya 6 kg plutonium. Jenderal Leon La Porte, mantan panglima militer AS di Korea Selatan, mengatakan, Korea Utara memiliki 3-6 bom nuklir sebelum tahun 1994 ("Giliran Korut" 1). Lain halnya dengan sumber minyak, Korea Utara memiliki cadangan minyak yang sedikit dan bergantung pada energi batubara dan *hydropower*, sehingga Korea Utara beralih menggunakan tenaga nuklir. Bahkan negara ini sering mengalami pemadaman karena mengalami krisis tenaga listrik (Wibawarta 74).

Menurut Norman D Levin, kepentingan nasional Korea Utara adalah melestarikan rezim Kim Il Sung, mempertahankan kemerdekaan Korea Utara, melanjutkan target reunifikasi sesuai syarat-syarat Korea Utara, dan menghasilkan dukungan untuk perkembangan ekonomi Korea Utara dan modernisasi militer (44). Berdasarkan kepentingan nasional yang ingin dicapai tersebut, pemerintah Korea Utara memutuskan untuk mulai mengembangkan sendiri program nuklir di negaranya. Keputusan ini juga didorong oleh tindakan yang AS mulai menggelarkan senjata nuklirnya di Korea Selatan akibat meningkatnya suhu politik pada masa Perang Dingin dan untuk menangkal adanya ancaman invasi dari Korea Utara (Wirengjurit 356).

Kementrian Energi dan Industri Atom Korea Utara adalah badan yang bertanggung jawab pada operasi harian program senjata nuklir. Badan ini membawahi organisasi-organisasi terkait nuklir. Medalia et al. mengatakan bahwa kebijakan negara Korea Utara terbagi antara Kim Jong Il dan Partai Komunis lain serta para pemimpin militer penasehatnya (1).

Pemerintah Korea Utara sengaja mengembangkan program proliferasi nuklirnya dan melakukan berbagai tindakan kontroversial yang provokatif agar mempunyai *bargaining power* untuk memperoleh keuntungan bagi negaranya. Korea Utara menggunakan isu nuklirnya sebagai alat negoisasi (*bargaining chip*) agar dapat memberikan pengaruh kepada dunia internasional, khususnya AS agar ia memperoleh keuntungan untuk negaranya sendiri yaitu mendapatkan bantuan-bantuan guna memenuhi kebutuhan domestiknya dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kekuasaan rezimnya. Korea Utara harus mencari jalan keluar agar mempunyai *bargaining power* agar tetap dapat bertahan di tatanan dunia baru yang tercipta sekarang ini.

Hal ini tercermin pada tindakan Korea Utara yang memperlambat proses kecepatan pelucutan senjata nuklirnya karena lambannya bantuan yang diterima dari AS sebagai kompensasi atas pelucutan program nuklir di negaranya. Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada Februari 2007, Korea Utara akan mendapat bantuan kemanusiaan, energi, dan ekonomi sebagai imbalan untuk melakukan pembongkaran seluruh fasilitas nuklir yang ada (Zisis dan Bajoria 2). Pada 26 Desember 2008, Hyun Hak Pong, seorang pejabat Korea Utara mengatakan bahwa kompensasi ekonomi telah tertunda penyampaiannya, dan itu berarti negara tersebut pun tak memiliki pilihan lain kecuali menyesuaikan kecepatan proses pelucutan fasilitas nuklirnya ("Korut Ancam" 9).

Menurut Choon Kun Lee, tatanan dunia baru atau "*new world order*" pada masa sekarang bagi Korea Utara adalah "*bad world order*" karena berarti berakhirnya sosialisme dari Uni Soviet, sosialis China, dan beberapa pihak di Korea Utara sendiri. China dan Rusia telah menormalisasi hubungannya dengan Korea Selatan dan hal tersebut membuat Korea Utara merasa putus asa dan semakin terisolasi. Untuk menangani masalah ini, dan untuk mempertahankan kekuatannya, para pemimpin Korea Utara merasa harus meningkatkan kekuatan

militernya dengan berbagai cara. Bila dilihat dari sudut pandang militer secara umum, program nuklir Korea Utara dapat dianggap sebagai usaha untuk pertahanan nasional (*national survival*) (164-165). Korea Utara dapat menggunakan kekuatan militer dan program nuklirnya sebagai alat untuk daya tawar politik (*political bargaining chips*) dengan tujuan untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara tetangga (Ishizu 203).

Korea Utara menggunakan taktik menawar (*bargaining tactics*) melalui *granting of rewards* yaitu dimana sebuah negara B, sebelum menyetujui permintaan negara A, akan bersikeras agar negara A akan memberikan penghargaan atau bayaran kepada negaranya (Holsti 125). Dalam hal ini, sebelum memenuhi permintaan AS, Jepang, dan dunia internasional untuk menutup semua program nuklirnya, Korea Utara bersikeras agar diberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.

Samuel S Kim mengatakan bahwa Korea Utara telah mengadopsi serangkaian luas taktik di dalam dan di luar konflik asimetris dan proses-proses negosiasi untuk mengurangi alternatif-alternatif di pihak lawan dan melemahkan keteguhan dan kendali pihak lawan (82-83). Konflik asimetris disini menunjukkan hubungan Korea Utara dengan AS dan Jepang: AS sebagai negara adidaya yang kuat secara militer, ekonomi, dan politik luar negerinya dan Jepang yang dikenal sebagai raksasa Asia yang kuat secara ekonomi dan menjadi donor terbesar untuk negara-negara Asia, berhadapan dengan sebuah negara kecil yang posisi dan kondisi ekonominya lebih lemah dibanding kedua negara tersebut. Tetapi Korea Utara dapat menggunakan taktik dengan isu nuklir sebagai alat tawar menawarnya agar mendapatkan kepentingan nasional yang ia inginkan dan secara bersamaan juga melemahkan keteguhan dan kendali pihak lawan dengan diplomasi nuklirnya tersebut. AS dan Jepang tidak mempunyai pilihan lain untuk melakukan perundingan dengan Korea Utara dan memenuhi tuntutan atas pemenuhan kebutuhan domestik Korea Utara untuk mengantisipasi hal terburuk yang ditakutkan, yaitu praktek proliferasi nuklir Korea Utara yang lebih berkembang dan akan semakin membahayakan kawasan maupun dunia internasional. Sedangkan Korea Utara justru merasa aman dengan menyebarkan ancaman kepada dunia, khususnya AS dan Jepang.

2.3 Hubungan Korea Utara-Jepang-AS

2.3.1 Hubungan Korea Utara dan Jepang

Hubungan antara Jepang dan Korea Utara memiliki trauma historis akibat perjalanan sejarah kedua negara yang pasang surut akibat rangkaian peristiwa yang telah menimbulkan berbagai konflik. Hubungan kedua negara adalah sebuah hubungan yang tidak harmonis akibat latar belakang sejarah yang rumit, antara lain karena praktek kolonialisasi Jepang yaitu pada saat invasi Toyotomi Hideyoshi ke Korea tahun 1592 sampai dengan 1598 (Lee 159), dan saat Jepang berkuasa atas Semenanjung Korea dari tahun 1910 sampai tahun 1945 (Drifte 53).

Jung-Hoon Lee mengatakan bahwa pada saat masa kolonialisme Jepang di Korea, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan untuk “menJepangkan” orang-orang Korea, antara lain melarang penggunaan bahasa Korea, pemakaian nama keluarga Jepang pada mereka, dan menetapkan Shintoisme sebagai agama nasional Korea (163-164). Bahkan pernah terjadi pembantaian orang Korea di Jepang pada tahun 1923 karena pemerintah Jepang pada saat itu memiliki perlakuan diskriminasi terhadap rakyat Korea serta ketakutan rakyat Korea akan melawan pemerintahan Jepang (Ed. Surajaya 72). Jepang juga pernah mendapatkan keuntungan ketika terjadinya Perang Korea, dimana karena perang tersebut perekonomian Jepang yang sedang sangat lemah menjadi membaik akibat keberadaan pangkalan militer AS di Jepang (Kan, “War” 3).

Walaupun hubungan kedua negara berjalan kurang baik, terdapat juga berbagai usaha normalisasi hubungan. Dari pihak Korea Utara, yaitu pada awal tahun 1970-an pemimpin Korea Utara Kim Il Sung menyatakan keinginannya untuk mengadakan hubungan ekonomi dan kultural dengan Jepang pada wawancara di surat kabar Jepang (Soderberg 438).

Kedua negara juga pernah mengadakan perjanjian-perjanjian antar kedua belah pihak yang bertujuan untuk bersama-sama memperbaiki hubungan. Seperti *Treaty of Basic Relations between Japan and DPRK* pada tahun 1965; dimana pada perjanjian tersebut Korea Utara menuntut Jepang untuk memberikan kompensasi kepada pihaknya, perundingan normalisasi (*normalization talks*) yang

pertama kali diadakan di Pyongyang pada bulan Januari 1991. Pihak Jepang juga beberapa kali mengadakan kunjungan ke Korea Utara baik kunjungan resmi negara atau kunjungan dari partai politik tertentu (Kenji 11).

Pada permulaan tahun 1990 Jepang memperlihatkan keinginan yang kuat untuk memperbaharui hubungannya dengan Korea Utara. Kemudian pada September 1990 Tokyo mengirimkan delegasi ke Pyongyang yang dipimpin oleh Shin Kanemaru bersama para anggota partai politik LDP dan SDP. Korea Utara memberikan respon positif yang mengindikasikan keinginan untuk mengadakan negoisasi bilateral untuk normalisasi diplomatik. Sebagai hasilnya tercipta sebuah deklarasi dengan Partai Buruh Korea Utara yang menyatakan bahwa adalah sebuah kewajiban bagi Jepang untuk mengumumkan permintaan maaf resmi dan membayar kompensasi yang dianggap cukup, tidak hanya untuk kerugian akibat 35 tahun kolonialisme Jepang, tetapi juga untuk kerugian yang diderita Korea Utara akibat kebijakan-kebijakan antagonistik Jepang terhadap Pyongyang selama 45 tahun masa pascaperang. Sedangkan dari pihak Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir di Korea Utara harus dimusnahkan. Hal ini menunjukkan kekhawatiran Jepang terhadap perkembangan nuklir Korea Utara. Perundingan normalisasi terus berlanjut delapan kali sampai November 1992. Tetapi semuanya gagal, dan Korea Utara menunda jalannya pertemuan pada perundingan normalisasi yang terakhir (Nam dan Kim 112-113).

Jepang juga beberapa kali memberikan bantuan kepada Korea Utara. Bantuan luar negeri –pemberian uang, barang-barang, teknologi atau nasihat teknikal dari negara penyumbang kepada negara penerima- adalah sebuah instrumen dari kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri sejak beberapa abad yang lalu (Holsti 192).

2.3.1.1 Kasus Penculikan Warga Jepang oleh Pihak Korea Utara

Peristiwa yang membuat hubungan kedua negara semakin renggang adalah isu penculikan orang Jepang oleh pihak Korea Utara yang telah menjadi prioritas bagi diplomasi Jepang. Bahkan isu penculikan ini telah mengakibatkan munculnya kelompok anti Korea di Jepang (Soderberg 434). Korea Utara menculik sejumlah warga Jepang, terutama antara tahun 1970-an dan 1980-an untuk melatih mata-mata Korea Utara mengenai kebudayaan dan bahasa Jepang

agar dapat menyusup ke Korea Selatan dan menyamar sebagai warga Jepang. Pada September 2002 Kim Jong Il untuk pertama kalinya mengakui adanya penculikan tersebut. Para korban diculik ketika berada di pinggir pantai, lalu dibawa dengan kapal karet ke kapal besar, sementara yang lainnya diculik ketika berada di Eropa. Warga Jepang yang diculik ini diharuskan untuk mengajar bahasa dan kebudayaan Jepang kepada agen rahasia Korea Utara (Wibawarta 78).

Masalah penculikan ini pertama kali terkuak akibat pengakuan Kim Hyon Hui, seorang wanita Korea Utara yang dihukum akibat melakukan pengeboman di Korean Airlines pada tahun 1987. Ia mengaku kepada pihak berwenang Korea Selatan bahwa ia telah diajari bahasa Jepang di Korea Utara oleh seorang wanita Jepang korban penculikan yang bernama Lee Un-Hae. Proses negosiasi perbaikan hubungan kedua negara telah berlangsung sejak lama tetapi tetap jauh dari kata berhasil. Kemajuan baru tampak ketika tanggal 17 September 2002 Perdana Menteri Koizumi melakukan kunjungan ke Korea Utara, dalam kunjungannya itu kemudian dilakukan pertemuan antara kedua pihak yang menghasilkan Deklarasi Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, ketua pertemuan Kim Jong Il mengatakan bahwa isu penculikan tersebut adalah benar dan beberapa korban penculikan telah meninggal, kemudian ia menyatakan permintaan maaf dan penyesalan serta berjanji tidak akan pernah melakukan penculikan lagi. Ia juga mengakui bahwa operasi kapal-kapal Korea Utara telah melanggar batas wilayah laut Jepang dan berjanji tidak akan ada lagi pelanggaran tersebut di kemudian hari (Kenji 5,7,21).

Pada Februari 2004 diadakan pertemuan antara Jepang dan Korea Utara untuk membahas mengenai masalah penculikan. Pada pertemuan ini Jepang dengan tegas meminta resolusi atas isu penculikan termasuk pengembalian lima korban penculikan kepada keluarga Jepang dan informasi lengkap tentang sepuluh orang yang keberadaannya tidak diketahui. Disetujui juga bahwa pertemuan antar pemerintah kedua negara akan dilanjutkan pada masa mendatang (*Diplomatic Blue Book 2004* 7). Tetapi pertemuan ini berakhir tanpa penjelasan yang memuaskan dari pihak Korea Utara. Kemudian pada 26 Januari 2005 Korea Utara memberikan memorandum kepada Jepang yang berisi bahwa hasil pemeriksaan Jepang terhadap jasad dari Megumi Yokota (salah satu korban penculikan) adalah rekayasa. Hal itu menyebabkan dialog antar kedua negara ditangguhkan sampai

November 2005 dimana diadakan pertemuan kembali yang membahas mengenai isu ini. Pada pertemuan ini Jepang meminta agar korban penculikan yang masih hidup dikembalikan ke Jepang, Korea Utara memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai isu ini, dan para tersangka penculikan diserahkan kepada Jepang. Sebagai reaksi atas permintaan ini, Korea Utara mengatakan bahwa kasus penculikan telah terselesaikan, tetapi juga menyatakan mengerti bila Jepang akan terus menggunakan isu tersebut sebagai pokok masalah. Pada saat yang sama, Korea Utara mengisyaratkan agar Jepang melakukan 'penuntasan masa lalu' secara tulus termasuk masalah terkait para korban selama periode kolonial Jepang. Selanjutnya diadakan pertemuan kembali pada Desember 2005 dan Februari 2006 tetapi tetap tidak ada kemajuan yang berarti mengenai isu penculikan ini maupun normalisasi hubungan antar kedua negara (*Diplomatic Blue Book 2006* 21-22). Sampai tahun 2007 Jepang tetap meminta tindakan yang nyata terhadap resolusi isu penculikan ini, tetapi Korea Utara tidak memberikan respon kepada Jepang (*Diplomatic Blue Book 2008* 3).

2.3.1.2 Komunitas Korea di Jepang

Di Jepang sekarang terdapat komunitas orang-orang Korea yang hidup di Jepang dan telah menjadi satu-satunya minoritas asing yang penting di negara itu. Mereka kira-kira berjumlah enam ratus ribu orang yaitu sisa-sisa dari tenaga kerja paksa yang didatangkan dari Korea selama Perang Dunia II. Sebenarnya sebelum itu pun banyak orang Korea yang masuk ke Jepang, yaitu sampai dengan abad ke 7, mereka masuk sebagai imigran ketika terjadi perpindahan penduduk dari Semenanjung Korea ke Jepang. Walaupun orang-orang Korea di Jepang ini sebagian besar secara kultural sudah diasimilasikan, mereka tetap didiskriminasi oleh orang Jepang dan akibatnya mereka berkembang menjadi kelompok minoritas politik yang merepotkan (Reischauer 202).

Karena Semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian yaitu Korea Selatan yang kapitalis dan Korea Utara yang berbasis komunis, populasi orang Korea di Jepang pun terbagi menjadi dua bagian: organisasi yang berorientasi ke Selatan (*mindan*) dan organisasi yang tergabung ke Utara (*chonryun*) (Sugimoto 178). Mereka yang sudah berkewarganegaraan Jepang memberikan bantuan sebesar enam milyar yen kepada Korea Utara. Mayoritas dari mereka mendukung rezim

Korea Utara karena merasa kurang dapat menerima sikap dan perlakuan pihak Jepang kepada mereka (Irsan, "Orientasi Pertahanan" Materi Kuliah 20). Adanya komunitas Korea di Jepang inilah yang juga menyebabkan pemerintah Jepang memiliki posisi yang sulit dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara.

2.3.1.3 Isu Nuklir Korea Utara

Hubungan yang sudah renggang kian memburuk dan sulit mencapai perjanjian normalisasi akibat isu nuklir Korea Utara. Krisis nuklir Korea Utara yang pertama pada tahun 1994 mengakibatkan ketegangan antara kedua negara ketika Korea Utara mengancam akan menghancurkan Jepang apabila membantu AS yang bersikap memusuhi Korea Utara dan apabila Jepang melaksanakan sanksi ekonominya terhadap Korea Utara (Irsan, *Hari-hari* 450).

Jepang merasa terancam dengan berbagai aksi percobaan senjata yang dilakukan oleh Korea Utara antara lain:

1. Percobaan peluncuran misil balistik Rodong (Nodong) ke lautan Jepang pada bulan Mei 1993 ("Japan's Crisis" 1)
2. Peluncuran roket misil balistik Taepodong 1 bermuatan senjata nuklir yang mengenai ruang udara wilayah Jepang pada Agustus 1998,
3. Peluncuran misil-misil darat penghancur kapal laut ke lautan Jepang pada Maret 2003 (Hook et al. 485, 469).
4. Tes misil jarak dekat ke lautan Jepang pada tanggal 1 Mei 2005. Tetapi tes misil jarak dekat ini tidak mampu mencapai wilayah Jepang dan lebih diartikan sebagai usaha untuk memprovokasi daripada sebagai indikator kemajuan teknologi ("Japan and" 7)
5. Peluncuran tujuh buah misil yang melewati lautan Jepang pada Juli 2006 (Chull 8)
6. Peluncuran beberapa rudal jarak pendek yang jatuh di Laut Kuning pada 28 Maret 2008. Korea Utara memiliki lebih dari 1000 rudal, sedikitnya 800 rudal Korea Utara ini balistik yang bisa menjangkau seluruh wilayah Korea Selatan dan sebagian wilayah Jepang. ("Korut Luncurkan" 9)
7. Peluncuran roket jarak jauh yang dikatakan sebagai sebuah satelit komunikasi eksperimental pada 5 April 2008. Roket ini meluncur dari timur laut Korea

Utara dan mencapai ruang udara Jepang dalam tujuh menit. Tingkat pertamanya jatuh di pantai barat Akita antara Jepang dan Semenanjung Korea, sedangkan tingkat keduanya jatuh di lepas pantai timur laut Jepang. Dikhawatirkan bahwa peluncuran roket itu adalah uji coba peluncuran rudal jarak jauh, Taepodong-2, yang secara teori bisa menjangkau wilayah AS di Alaska atau Hawaii. AS, Jepang, dan Korea Selatan menyebut peluncuran roket itu sebagai pelanggaran atas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718. Resolusi itu melarang Korut melakukan aktivitas uji coba rudal balistik jenis apa pun. Perdana Menteri Jepang Taro Aso menyebut langkah Korea Utara ini provokatif. Jepang mengancam akan menembak jatuh puing apa pun dari roket itu. Jepang juga menempatkan pencegat rudal di pesisir dan kapal yang dilengkapi rudal di laut utara Jepang guna memonitor peluncuran roket ("Korea Utara" 1).

8. Peluncuran roket multistahap dan uji coba nuklir bawah tanah pada 25 dan 26 Mei 2009 ("Korut Bersiap" 10).

Akibat perjalanan hubungan kedua negara yang penuh konflik, tingkat ketidakpercayaan (*distrust*) antara kedua negara menjadi sangat tinggi. Kedua negara terlihat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap satu sama lain yang sulit terwujud karena masing-masing pihak terus menuntut pihak yang lain demo tercapainya kepentingan nasional negaranya tanpa berusaha memperbaiki atau menunjukkan niat baik atau usaha dari mereka sendiri: Korea Utara menuntut Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi untuk kerugian akibat praktek kolonialisasi yang telah dijalankan Jepang pada masa lalu, sedangkan Jepang menuntut Korea Utara untuk memprioritaskan penyelesaian isu penculikan untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Kedua negara terlihat saling menuntut tanpa ada usaha dari pemerintahannya sendiri untuk memperbaiki hubungan.

Sebenarnya pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Takeshita Noboru pada bulan Maret 1989 pernah menyatakan penyesalan dan rasa duka yang sangat untuk hal-hal yang pernah dilakukan Jepang di Semenanjung Korea pada masa lalu (Kenji 11), Jepang juga mencoba memperbaiki hubungan dengan

memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan dan bahan pangan kepada Korea Utara, tetapi Jepang tidak pernah bersedia untuk memberikan kompensasi.

Tidak semua negara Asia menerima kompensasi perang atau bantuan pinjaman dari Jepang. Pemerintah Jepang menyatakan bahwa memberikan kompensasi untuk kependudukan kolonial Jepang pada masa lalu bukanlah sebuah kewajiban yang legal. Tetapi Jepang lebih memilih untuk melakukan kerja sama ekonomi (*economic cooperation*) seperti yang dilakukan dengan Korea Selatan. Jepang memberikan dana bantuan dan bantuan pinjaman bunga rendah kepada Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melihat bantuan-bantuan tersebut sebagai bentuk kompensasi dan menggunakan sebagian dari bantuan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada para korban kolonialisme Jepang (Soderberg 438).

2.3.2 Hubungan Jepang dan AS

Jepang dan AS adalah dua negara yang mempunyai hubungan bilateral yang sangat erat. Hubungan bilateral tersebut dimulai setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu yang dipimpin oleh pihak AS ketika Perang Dunia II. Karena kekalahannya tersebut, Jepang menerima konsekuensi dengan terbentuknya Pakta Pertahanan AS-Jepang (*US-Japan Security Treaty*).

Perdana Menteri Yoshida Shigeru yang pada saat itu menerima kepemimpinan AS mengatakan bahwa: "Beraliansi dengan AS merupakan kunci dasar bagi Jepang melakukan rekonstruksi keadaan ekonomi dan merupakan tonggak utama dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri" (Irsan, *Budaya* 71).

Perdana Menteri Yoshida Shigeru dikenang akan upaya-upayanya memperoleh kemerdekaan Jepang secepat mungkin; yang dicapainya dengan menyediakan pangkalan militer untuk AS, menandatangani perjanjian keamanan Jepang-AS, yang selanjutnya mempersenjatai Jepang bahkan dalam situasi terikat perjanjian, dengan landasan artikel 9 Konstitusi, untuk tidak mempersenjatai negara Jepang lagi. Secara tak terhindarkan hal ini menempatkan pemerintah Jepang dalam situasi yang canggung terhadap perluasan interpretasi Artikel 9,

diantara berbagai isu lain, namun seperti diramalkan Yoshida; jika Jepang telah menciptakan angkatan bersenjata seperti yang diharapkan Amerika Serikat pada waktu itu, maka Jepang pasti sudah terseret dalam Perang Korea (1950-53) (Shinichi 4).

US-Japan Security Treaty diciptakan sebagai lanjutan dari *The Peace Treaty of San Francisco* yang dihadiri oleh 48 negara berorientasi ke Barat mencapai kesepakatan pada tahun 1951, dimana pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Jepang mendapatkan kembali kedaulatannya dan akan dibantu untuk membangun kembali ekonomi dan hubungan internasionalnya. Pakta Pertahanan AS-Jepang yang dibuat pada tahun yang sama memberikan perlindungan keamanan yang hemat biaya pada Jepang, dan sebagai gantinya Jepang harus menyediakan lokasi-lokasi pangkalan militer AS untuk menopang komitmen persenjataan tersebut, yang melekat pada kepentingan-kepentingan AS (Drifte 6).

Isi dari perjanjian pasifis tersebut yang sangat terkenal dan menimbulkan banyak kontroversi di parlemen maupun masyarakat Jepang adalah artikel 9, yang berisi:

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintain. The right of belligerency of the state will not be recognize. (Glenn D Hook dan Gavan McCormack 8)

Terjemahan: Dengan cita-cita tulus pada perdamaian internasional yang berdasarkan keadilan dan keteraturan, masyarakat Jepang selamanya memungkiri perang sebagai hak berdaulat sebuah negara dan ancaman penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan pada paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, dan juga hal-hal lain yang berpotensi pada terjadinya perang, akan ditiadakan. Hak untuk berperang negara Jepang tidak akan diakui.

Akibat perjanjian keamanan tersebut Jepang tidak dapat memiliki angkatan militer yang mandiri, melainkan hanya memiliki polisi nasional cadangan yang dibentuk pada tahun 1950 dan berubah menjadi Pasukan Bela Diri Jepang atau *Self-Defense Force* (SDF) pada tahun 1954. Kemudian peran dan fungsi SDF perlahan-lahan meningkat dan meluas, sampai pada tahun 1990-an dana pertahanan Jepang merupakan yang tertinggi keempat di dunia. *Ground Self-Defense Force* (GSDF), *Maritime Self-Defense Force* (MSDF), dan *Air Self-Defense Force* (ASDF) secara ukuran dan kecanggihan teknologi sejajar dengan Inggris (Hook dan McCormack 14).

Pakta Pertahanan Jepang-AS juga terus mengalami pembaharuan yaitu pada tahun 1996, kedua negara menandatangani *US-Japan Declaration on Security* yang menyatakan bahwa persekutuan kedua negara akan terus berlanjut dan berlaku sebagai dasar untuk stabilitas dan kemakmuran Asia Pasifik pada abad ke 21. Lalu pada tahun 1997 pedoman baru kerjasama pertahanan Jepang-AS kembali diperbaharui, dua tahun kemudian parlemen Diet Jepang mengeluarkan tiga Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pedoman baru tersebut yang berisi tentang rincian usaha-usaha untuk meningkatkan persekutuan Jepang dan AS (Benjian 7). Karena AS mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas pertahanan dan keamanan Jepang, Jepang dapat berkonsentrasi penuh pada ekonominya dan sebagai balasannya Jepang akan mendukung target utama dari hubungan luar negeri dan kebijakan keamanan AS, serta menyediakan pangkalan militer untuk AS di Jepang (Drifte 28). Sedangkan AS sebagai negara pelopor demokrasi mulai kehilangan akar demokrasinya dan semakin mementingkan ekspansi hegemoninya ke seluruh dunia, walaupun menuai protes di berbagai kalangan nasional maupun internasional, seperti kasus invasi Irak yang bertujuan menguasai persediaan minyak yang mengatasnamakan penumbangan rezim Saddam Hussein yang dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia. Bahkan menurut Norman Mailer, warga AS sendiri merasa bahwa negaranya telah tumbuh secara kultural dan emosional menjadi lebih arogan dan gagal dalam merealisasikan demokrasi yang sesungguhnya (15-16).

Perjanjian Pasifis tersebut juga menciptakan keadaan dimana Jepang walaupun memiliki kebebasan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan politiknya, tetapi keterkaitan hubungan politiknya dengan AS telah membuat kebijakan politik dan hubungan luar negerinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan global AS maupun kondisi regional di sekitar negaranya (Irsan, "Ringkasan: Jepang" 3). Hal ini berpengaruh pada praktek politik Jepang sekarang secara regional maupun global. Bahkan menurut beberapa pengamat, sejak akhir Perang Dunia II Jepang tidak pernah memiliki apa yang pantas disebut sebagai sebuah kebijakan luar negeri (Shinichi 3).

Persekutuan Jepang dengan AS juga terkadang menyulitkan hubungannya dengan sesama negara Asia karena kepentingan global AS sering bertentangan dengan negara Asia yang lain, contohnya dalam kasus isu nuklir Korea Utara. Tetapi di lain pihak, perjanjian pertahanan ini membuat hubungan Jepang dan AS selalu stabil dan terhindar dari konflik. Hal ini juga membuat negara-negara Asia lainnya yang pernah menjadi korban kekejaman kolonial Jepang terhindar dari rasa khawatirnya bahwa negara Jepang akan melakukan hal yang sama lagi. Hal ini membantu usaha Jepang dalam memperbaiki citra negara penjajah yang kejam menjadi negara bersahabat yang cinta damai dan mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara tetangganya.

Menurut Abdul Irsan, dalam menjaga stabilitas dan keamanan Asia Timur, Jepang dan AS memiliki kepentingan strategis secara timbal balik; persekutuannya dengan AS merupakan faktor yang mendukung kepentingan Jepang menghadapi masalah keamanan di wilayah ini, dan bagi AS Jepang adalah benteng pertahanan terdepan untuk melindungi AS dari kawasan Pasifik yang dapat langsung mengancam wilayah AS ("Peranan Budaya" 2-3).

AS mengharapkan peran Jepang dalam isu nuklir ini karena Jepang adalah negara sekutu terbesar AS yang berada di kawasan yang sama dengan Korea Utara. AS mendukung Jepang agar berperan aktif dalam proses penyelesaian isu nuklir Korea Utara, karena seperti disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan luar negeri Jepang pada dasarnya selalu berorientasi mendukung kepentingan global AS akibat terikat perjanjian Pasifis yang mengatakan Jepang berada di bawah "payung" keamanan AS. Tetapi dalam kasus isu nuklir Korea Utara ini, Jepang

tidak hanya bertindak sebagai sekutu AS. Jepang juga merasa berkepentingan karena merasa terancam secara regional dan memiliki tuntutan untuk menyelesaikan persoalan antar Jepang dan Korea Utara. Jepang dan AS bersama-sama mengupayakan agar Korea Utara mau mengakhiri proliferasi program nuklirnya demi kepentingan bersama.

2.3.3 Hubungan Korea Utara dan AS

Hubungan Korea Utara dan AS pada masa sekarang juga dilatarbelakangi oleh faktor historis. Dimana pada era Perang Dingin, seluruh dunia terbagi menjadi blok Barat yang mendukung AS, blok Timur yang mendukung Uni Soviet, dan negara-negara netral yang tergabung dalam non-blok. Korea Utara adalah negara Komunis yang mendapat dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. AS melihat Korea Utara sama seperti ia melihat Iran: negara kecil pembangkang yang mengembangkan senjata nuklir. Hal ini tentu sangat mengancam eksistensi peranan AS secara global dan harus segera diatasi.

Bila senjata pemusnah massal sampai ke tangan teroris, maka dapat diasumsikan bahwa mereka akan menggunakannya. Untuk mencegah hal tersebut, AS harus melakukan upaya-upaya untuk menghentikan penyebaran teknologi tersebut. Logika tersebut menghadirkan justifikasi resmi untuk perang terhadap Irak, dan mengarahkan kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Iran (Glosserman 12-13).

Pada tahun 1994 AS dan Korea Utara menandatangani *Agreed Framework*, berdasarkan perjanjian tersebut kemudian dibentuklah sebuah organisasi internasional bernama KEDO (*Korean Peninsula Development Organization*) AS, Korea Selatan, dan Korea Utara pada bulan Maret 1995. Organisasi ini bertujuan untuk mendanai dan menyediakan reaktor air ringan dan energi alternatif untuk Korea Utara (*Diplomatic Blue Book* 2002 24). Berdasarkan perjanjian tersebut Korea Utara bersedia membekukan program nuklirnya. Tetapi pada Desember 2002, Korea Utara menyatakan telah membekukan kesepakatan *Agreed Framework* dengan AS. Hal ini disebabkan oleh tindakan AS yang secara sepihak menolak melaksanakan kewajiban menyediakan bahan bakar sebagai sumber energi kepada Korea Utara. Pemerintah Korea Utara juga menyalahkan pemerintah AS atas situasi yang semakin menegang di Semenanjung Korea akibat

krisis nuklir tersebut. Pada saat mengumumkan pengunduran dirinya dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa pencabutan pembekuan nuklir oleh negaranya adalah tindakan khusus memelihara kedaulatan dan hak kelangsungan agar tidak dirugikan oleh AS, dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga listrik yang mendesak. Bahkan Korea Utara mengatakan bahwa pembekuan kembali instansi nuklir Korea Utara sangat tergantung pada AS. Tetapi AS ternyata tidak memberi reaksi seperti yang diharapkan, dan tetap mempertahankan sikapnya menuntut Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya terlebih dahulu sebagai syarat dibukanya dialog (Wibawarta 74).

Setelah Korea Utara melakukan berbagai percobaan senjata nuklir dan misilnya, pada Januari 1996 Menteri Luar Negeri AS Thomas Rubbard menghubungi Korea Utara agar mengadakan pertemuan untuk membicarakan isu senjata misil Korea Utara. Kemudian pertemuan dilangsungkan pada 21 April 1996 di Berlin untuk membicarakan proliferasi misil. Lalu pada 24 Mei 1996 AS mengeluarkan sanksi bagi Korea Utara yaitu melarang ekspor segala sesuatu yang berhubungan dengan misil kepada Perusahaan Changgwang Sinyong di Korea Utara. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 13 Juni 1997 dan tidak menghasilkan resolusi yang berarti. Pada tahun 1998, Korea Utara menolak untuk memperbaiki hubungannya dengan AS yang mengumumkan bahwa Korea Utara sedang membangun fasilitas untuk peluncuran rudal berikutnya (Lee dan Hyun Cho 136-137).

Pada bulan November 1998, Departemen Pertahanan AS mengumumkan Strategi Keamanan AS untuk Kawasan Timur Asia Pasifik (*US Security Strategy for the East Asia Pasific Region*). Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan kepentingan keamanan AS dan kelanjutan kebijakan luar negerinya yang tercermin pada enam hal yang difokuskan. Salah satunya adalah untuk menghalangi Korea Utara, mencegah perang di Semenanjung Korea, dan mencegah proliferasi nuklir (Song 139). Terlihat bahwa isu nuklir Korea Utara dan perdamaian di Semenanjung Korea telah menjadi fokus pemerintahan AS.

Menurut Hiramatsu Kenji, pemerintahan AS yang dipimpin oleh Presiden Bush memutuskan untuk tidak berkompromi dengan Korea Utara, tidak seperti

pemerintahan Clinton yang pernah mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara (22). Pemerintah Clinton juga pernah mengumumkan akan meringankan sanksi kepada Korea Utara setelah tercapai kesepakatan untuk menghentikan tes misil pada September 1999 (Lee dan Hyun Cho 137).

Korea Utara menggunakan isu senjata nuklir dan misilnya untuk dijadikan alat negoisasi diplomatik untuk memberikan pengaruh yang kuat agar dapat meningkatkan hubungan Korea Utara dan AS melalui negoisasi dengan AS, sehingga Korea Utara memperoleh bantuan ekonomi, ekspansi hak mereka untuk tampil di komunitas internasional, dan lain-lain. Korea Utara dapat menggunakan ancaman nuklir dan misilnya sebagai tekanan politik terhadap Korea Selatan, Jepang, dan tentunya AS (Nam 90). Korea Utara menganggap pengembangan misil adalah hak negaranya dan bila AS menginginkan program ini dihentikan maka harus ada harga yang dibayar, sedangkan AS berpendapat bahwa Korea Utara harus mematuhi peraturan pengendalian senjata internasional dan tidak ada pembayaran bila harus menghentikan program tersebut (Lee dan Hyun Cho 151).

Dari seluruh dunia internasional, Korea Utara sebenarnya hanya memfokuskan sasaran negosiasinya kepada AS, hal ini terlihat dari tuntutan diadakannya dialog dengan AS dan tindakan atau aksi yang dijalankan Korea Utara dalam isu nuklirnya selalu dipengaruhi oleh hubungannya dengan AS. Krisis nuklir Korea Utara pun terulang untuk yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 2002, akibat keputusan AS untuk mengambil tindakan penghentian bahan bakar ke Korea Utara. Korea Utara menggunakan isu nuklir ini sebagai alat untuk memeras AS agar kebutuhan domestiknya terpenuhi dan agar mendapat pengakuan atas eksistensi militer negaranya.

Setelah krisis nuklir yang kembali muncul pada Oktober 2002, Korea Utara menyatakan menginginkan dialog tentang nuklir hanya dengan AS saja, sementara AS tetap pada pendiriannya yang tidak akan setuju untuk melakukan negosiasi bilateral dengan Korea Utara karena Korea Utara dianggap telah melanggar perjanjian *Agreed Framework*. Kemudian dengan bantuan China Perundingan Tiga Pihak (*Three Party Talks*) dilaksanakan pada 23-25 April 2003 di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, AS menyatakan kembali agar Korea Utara melakukan

pembongkaran yang lengkap, dapat diverifikasi, dan pasti atas seluruh program nuklirnya dan menekankan pentingnya untuk secepatnya melakukan perundingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Tetapi tidak ada kemajuan yang nyata selama proses *Three Party Talks* ini berlangsung (*Diplomatic Blue Book 2004* 26).

Berpola sama dengan hubungannya dengan Jepang, hubungan Korea Utara dan AS sulit mencapai titik temu karena kedua pihak saling menuntut pihak lain untuk melaksanakan keinginannya tetapi tidak disertai dengan niat baik untuk mengoreksi diri sendiri serta melakukan usaha-usaha yang dianggap mendukung untuk perbaikan hubungan kedua pihak dari pemerintah masing-masing.

Pada 13 Januari 2004 Pusat Kebijakan Nasional AS (*Center for National Policy*) mengumumkan sebuah dokumen yang berisi empat tahapan rencana yang diberikan oleh Korea Utara kepada AS pada Desember 2003, yang berisi:

1. Korea Utara mengumumkan keinginan mereka untuk membongkar program nuklirnya jika diberikan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal Korea Utara
2. AS diharapkan akan menjamin non-agresi yang tertulis dan memberikan kompensasi untuk kerugian yang dialami Korea Utara akibat kekurangan tenaga listrik. Setelah hal tersebut dilakukan, Korea Utara bersedia untuk mengakui kembali para inspektor program nuklir dan akan menghentikan program nuklirnya
3. AS dan Jepang dituntut agar menjalankan hubungan diplomatik yang maksimal dengan Korea Utara dan menyelesaikan isu misil Korea Utara
4. Penyelesaian reaktor listrik tenaga air dan pembongkaran fasilitas nuklir di Korea Utara, penarikan sanksi ekonomi, politik, dan militer terhadap Korea Utara, serta mencabut Korea Utara dari daftar negara yang mendukung teroris (Bechtol Jr 43-44).

2.4 *Six Party Talks* Sebagai Upaya Diplomasi Multilateral

Selain Jepang, terdapat juga negara-negara lain di kawasan yang merasa memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan Asia Timur. Isu nuklir Korea Utara tidak hanya menjadi kekhawatiran Jepang melainkan juga menjadi kekhawatiran negara-negara lain di kawasan Asia Timur. Sehingga mereka merasa berkewajiban untuk menjaga keamanan kawasan dan

mengantisipasi terjadinya hal-hal buruk di Semenanjung Korea. *Six Party Talks* (SPT) berakar dari *Three Party Talks* yaitu perundingan tiga pihak antara AS, Korea Utara, dan China sebagai mediator kedua negara. Kemudian berkembang menjadi SPT pada tahun 2003, yang terdiri dari Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Mereka semua berhadapan dengan Korea Utara untuk bersama-sama berusaha mengantisipasi isu nuklir Korea Utara dengan mengupayakan SPT sebagai sarana diplomasi multilateral untuk menyelesaikannya.

SPT bertujuan untuk membuat Korea Utara meninggalkan program pengembangan senjata nuklir dengan imbalan pembukaan hubungan diplomatik dan insentif ekonomi ("Korut Serahkan" 9). Perundingan pertama dilangsungkan pada bulan Agustus 2003, dimana pada pertemuan tersebut pemerintah Jepang memuji SPT sebagai pertemuan yang sangat penting dan kelanjutan dari proses ini sangat dibutuhkan untuk perdamaian dan solusi diplomatik isu nuklir Korea Utara (Ashikawa 420).

Berikut adalah hasil kesepakatan dari SPT yang pertama menurut *Diplomatic Blue Book 2004*:

1. Peserta SPT setuju untuk menyelesaikan isu nuklir dengan damai melalui dialog, untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta membuka jalan bagi perdamaian yang abadi
2. Peserta SPT menginginkan Semenanjung Korea yang bebas nuklir dan kekhawatiran yang beralasan mengenai keamanan Korea Utara harus dipertimbangkan dan diselesaikan
3. Peserta SPT setuju untuk mencari resolusi yang adil dan realistis dengan tahap-tahap dan tersinkronisasi, atau paralel dalam implementasinya
4. Peserta SPT setuju untuk tidak mengambil tindakan yang dapat meningkatkan situasi dalam proses menyelesaikan isu ini dengan damai
5. Peserta SPT setuju untuk membangun *mutual confidence*, memperkecil perbedaan pendapat, dan memperluas pandangan umum mereka melalui dialog
6. Peserta SPT setuju untuk melanjutkan proses SPT dan untuk secepatnya memutuskan melalui diplomatik tempat dan waktu perundingan selanjutnya (29).

Menurut website Departemen Luar Negeri Jepang (MOFA), SPT kedua dilangsungkan pada 25-28 Februari 2004 di Beijing, China. Pada SPT yang kedua ini selain membicarakan denuklirisasi juga membicarakan masalah penculikan orang Jepang oleh Korea Utara. SPT yang ketiga juga diadakan di Beijing pada 23-26 Juni 2004 di Diaoyutai Guest House ("MOFA") SPT keempat dilaksanakan pada Juli 2005. Hasil dari perundingan ini adalah Korea Utara berjanji untuk melakukan pembongkaran yang dapat diverifikasi atas semua senjata dan program nuklirnya. Kemudian SPT kelima dilaksanakan pada November 2005, dalam perundingan ini Korea Utara bersikeras pada keputusannya di tahap pertama perundingan itu –terkait tindakan anti pencucian uang oleh AS– sehingga perundingan berakhir tanpa mencapai hasil nyata apapun. Sebagai akibatnya, karena Korea Utara menolak menghadiri SPT kecuali AS mempertimbangkan langkahnya, maka tahun itu berakhir tanpa tahap kedua perundingan sama sekali (*Diplomatic Blue Book 2006 19*).

SPT keenam dilangsungkan pada Juli 2008 di Beijing. Berdasarkan *Joint Statement of the Six-Party Talks* (Pernyataan Bersama SPT) yang ditetapkan pada 19 September 2005, keenam peserta SPT setuju untuk:

1. Menyenggarakan sebuah mekanisme verifikasi dalam cakupan kerja SPT untuk melakukan verifikasi atas penghilangan nuklir dari Semenanjung Korea. Keenam pihak bersetuju untuk mengadakan sebuah mekanisme pengawasan di dalam cakupan kerja SPT.
2. Keenam pihak sepakat untuk mengadakan sebuah mekanisme pengawasan dalam cakupan kerja SPT. Misi dari mekanisme pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak menghormati dan menepati komitmen bersama dalam ranah kerja SPT, termasuk non-proliferasi dan pendampingan ekonomi serta energi pada Korea Utara.
3. Para pihak memformulasi sebuah jadwal untuk pendampingan ekonomi dan energi dengan pelucutan fasilitas-fasilitas nuklir di Yongbyon. Jepang menunjukkan kemauannya untuk berpartisipasi dalam pendampingan

ekonomi dan energi bagi Korea Utara sesegera mungkin ketika keadaannya sudah memungkinkan.

Korea Utara akan berupaya untuk merampungkan pelucutan fasilitas-fasilitas nuklir Yongbyon pada akhir Oktober tahun 2008.

4. Para pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi mereka pada tema “Prinsip-prinsip Pedoman Perdamaian dan Keamanan di Asia Timur Laut”.
5. Para pihak telah menggelar tukar pendapat tahap awal pada tindakan-tindakan tahap ketiga untuk implementasi Pernyataan Bersama tanggal 19 September 2005. Para pihak sepakat untuk melanjutkan menuju proses SPT dalam cara-cara yang komprehensif dan bekerjasama untuk kedamaian dan stabilitas yang tetap di Asia Timur Laut (“MOFA”).

2.5 Hubungan antar Negara-negara Peserta *Six Party Talks*

Bila dilihat berdasarkan kepentingan strategisnya, di dalam SPT terdapat dua kubu yang berhadapan dengan Korea Utara: Jepang dan AS dengan China dan Rusia. Jepang dan AS cenderung menekan Korea Utara dan memprioritaskan kepentingan nasional negaranya, sedangkan China dan Rusia menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap Korea Utara. Korea Selatan memiliki hubungan yang naik turun dengan Korea Utara karena terjebak dilema sebagai sekutu AS sekaligus negara serumpun dengan Korea Utara yang mencita-citakan reunifikasi kedua Korea.

Sejak era Perang Dingin dimana Jepang memutuskan untuk bersekutu dengan AS, otomatis keamanan negaranya sangat bergantung pada AS dan Jepang juga berintegrasi dengan kebijakan-kebijakan AS yang sering berseberangan dengan Moskow dan Beijing (Kan, “Postwar Japanese” 11). Dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara, Wakil Menteri Luar Negeri AS James Steinberg menyatakan, Jepang dan AS sepakat bersatu menghadapi Korea Utara (“Korut Bersiap” 10). AS juga menunjukkan dukungannya kepada Jepang untuk menyelesaikan masalah penculikan dengan mendesak delegasi Korea Utara agar menerima permintaan Jepang untuk mengadakan pertemuan bilateral (Ashikawa 421).

Dengan China dan Rusia, Korea Utara memiliki kedekatan hubungan sejak era Perang Dingin. Sesama penganut paham komunisme dan hubungan dagang yang terjalin baik telah menjadikan kedua negara tersebut sebagai mitra politik dan ekonomi yang sangat penting bagi Korea Utara. Berdirinya DPRK juga berkat peranan dan bantuan kedua negara tersebut.

China adalah mitra dagang terbesar dan terpenting bagi Korea Utara, dan penanaman modal China di Korea Utara semakin meningkat. Sedangkan dengan Jepang, kerja sama perdagangan kian merosot jumlahnya (Soderberg 449). China adalah negara pendonor terbesar untuk Korea Utara, negara ini menyuplai 88 persen dari seluruh kebutuhan minyak Korea Utara dan 90 persen impor pangan diluar bantuan (Byung-Joon 220). China setiap tahunnya juga menyediakan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sebanyak lebih dari satu juta metrik padi di tahun 1990an (Chull 6).

Hubungan politis antara Moskow dan Pyongyang terjadi ketika selama Perang Dingin melalui Perjanjian Kerjasama dan Pertahanan Mutual tahun 1961 (Kim 22). Kim Jong Il pernah melakukan kunjungan ke Rusia dan mengadakan dialog dengan Presiden Vladimir Putin, ia juga pernah bertemu dengan Presiden China Jiang Zemin di Pyongyang. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kedekatan hubungan Korea Utara dengan kedua negara tersebut (*Diplomatic Blue Book 2002* 34). Ketika Korea Utara meluncurkan roket pada April 2009 lalu, Rusia dan China juga menunjukkan sikap yang lebih lunak dibandingkan dengan dunia internasional dengan menyerukan agar negara-negara lain menahan diri menghadapi peluncuran roket Korea Utara. China, sumber utama bantuan ekonomi dan dukungan diplomatik Korut, mendorong semua pihak tetap tenang. Rusia juga bertindak serupa dengan meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea ("Korea Utara" 1). Begitu halnya dengan Rusia dan China, mereka pun memiliki hubungan bilateral yang sangat erat, bahkan Rusia lebih memilih untuk memprioritaskan China dibanding Jepang sebagai penerima minyak dari proyek pipa trans-Siberian (Park 87).

Korea Selatan yang terjebak dalam konflik yang tak terselesaikan dengan Korea Utara, berusaha menghindari perubahan rezim yang mendadak di

Pyongyang yang dapat menyebabkan negara ini untuk menanggung beban berat arus pengungsi darurat besar-besaran dari seberang perbatasannya. Banyak pemuda Korea Selatan yang menganggap tetangga mereka ini sebagai sepuhu yang miskin, dan Seoul telah melakukan pendekatan yang lebih lembut dibanding Washington kepada Pyongyang. Hubungan yang menghangat antara kedua Korea ini dikenal dengan “*Sunshine Policy*” atau “Kebijakan Cahaya Matahari” yang antara lain adalah bantuan Korea Selatan, juga proyek-proyek ekonomi termasuk kompleks industri Kaesong dan turisme ke Gunung Kumgang di Korea Utara (Zissis dan Bajoria 1). Kedua Korea bercita-cita mewujudkan reunifikasi tetapi konflik di kawasan, isu-isu yang berlangsung antara kedua negara, dan persekutuan Korea Selatan dengan AS menyebabkan hubungan kedua Korea tidak stabil. Bahkan pada Februari 2009, Korea Utara telah menghentikan semua perjanjian damai dengan Korea Selatan (“AS Peringatkan” 5).

Terbentuknya dua kubu dalam SPT juga didasari oleh trauma historis yang dialami oleh kedua Korea dan China sebagai korban penjajahan Jepang pada masa imperialis Jepang dahulu. Syamsul Hadi dan Shanty Dharmastuti mengatakan bahwa negara-negara di wilayah Asia Timur masih mengingat kekejaman imperialis Jepang dan memberikan reaksi yang buruk terhadap segala bentuk manifestasi militerisme Jepang (26). Karena latar belakang tersebut, negara-negara Asia Timur bekas jajahan Jepang ini tidak mudah menanamkan kepercayaan kepada Jepang, sehingga mempengaruhi perilaku politik negara-negara tersebut terhadap Jepang. Begitu halnya dalam pertemuan multilateral SPT, China dan kedua Korea masih mengalami perasaan *distrust* terhadap pemerintahan Jepang.

BAB 3

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG

TERHADAP ISU NUKLIR KOREA UTARA

3.1 Jepang sebagai Negara Pecinta Damai

Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah senjata atom diledakkan dari ketinggian rendah di atas kota Hiroshima, Jepang. Ledakan ini menewaskan 70.000 sampai 100.000 penduduk dan menghancurkan 13 km² wilayah kota. Tiga hari kemudian, di kota Nagasaki, serangan nuklir kedua menyebabkan kematian 40.000 masyarakat sipil dan menghancurkan 7 km² wilayah kota ini. Beberapa bulan setelah serangan ini, 10.000 orang diketahui terkena radiasi nuklir (Weston, ed 21). Akibat peristiwa ini masyarakat Jepang merasa kecewa dengan akibat perang, dan yakin bahwa hanya perdamaianlah yang bisa memberinya kesempatan untuk memelihara kelangsungan hidupnya (Reischauer 213).

Karakter bangsa Jepang pada masa modern terbentuk oleh pengalaman nenek moyang dan berbagai kejadian dalam sejarah Jepang. Isolasi pada jaman Bakufu telah membentuk pribadi yang tertutup pada orang Jepang. Setelah ekonomi negaranya mengalami kemerosotan tajam akibat serangan bom atom, Jepang bekerja keras membangun negaranya dan kemudian berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang sangat pesat hingga membuat kagum masyarakat dunia. Kejadian ini membentuk pribadi pekerja keras pada orang Jepang.

Tragedi bom atom ini pun telah membuat trauma masyarakat Jepang pada jaman dahulu dan membentuk karakter bangsa Jepang yang anti senjata nuklir dan mencintai perdamaian karena tidak ingin bencana dahsyat yang banyak memakan korban jiwa tersebut terulang lagi. Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan nuklir terdahsyat di dunia, Jepang menjadi trauma akan perang dan penggunaan senjata nuklir serta menyatakan dirinya sebagai negara pecinta damai. Keputusan ini diperkuat dengan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan AS sejak Jepang kalah di Perang Dunia II, dimana perjanjian tersebut tidak mengakui hak negara Jepang untuk berperang.

Pernyataan sebagai negara pecinta damai adalah juga sebagai salah satu upaya Jepang untuk mengubah citra Jepang yang sangat buruk dan trauma para negara tetangga akibat kekejaman kolonial Jepang pada masa lalu dengan mengembalikan kepercayaan negara-negara Asia yang pernah mengalami praktek kolonialisme Jepang agar Jepang dapat menjalin hubungan bilateral yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya dan dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti kerjasama ekonomi, budaya, dan pendidikan, sehingga berdampak positif bagi perkembangan domestik, regional, maupun global negara Jepang.

Sejak 1967, Jepang telah menerapkan kebijakan unilateral yang dikenal sebagai tiga prinsip non-nuklir: kebijakan melarang kepemilikan senjata nuklir, memproduksi senjata nuklir, dan mengizinkan senjata nuklir untuk dibawa ke dalam Jepang (Nishihara 61). Selain itu, bila Jepang memutuskan untuk mempersenjatai negaranya dengan nuklir kemungkinan akan mengakibatkan memburuknya hubungan dengan AS dan akan sangat menghambat perkembangan kedua negara itu (Saeki 193).

Selain menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, berikut ini adalah upaya-upaya Jepang dalam memerangi senjata nuklir dan meningkatkan mekanisme non-proliferasi di Asia maupun internasional:

1. Setiap tahun sejak 1994 menyerahkan sebuah draft resolusi kepada PBB mengenai masalah pelucutan nuklir, yang kemudian menerima banyak dukungan dari komunitas internasional
2. Pada November 2002 menyerahkan kepada PBB sebuah draft resolusi berjudul "Sebuah Jalan Menuju Penghapusan Total Senjata Nuklir" yang juga banyak menerima dukungan kuat dari komunitas internasional
3. Menjadi tuan rumah *Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation* pada bulan November tahun 2003, yang merupakan perundingan non-proliferasi komprehensif pertama pada tingkat senior di kawasan Asia,
4. Memandu misi Kerjasama Non-Proliferasi Jepang-ASEAN kepada sepuluh negara ASEAN pada Februari 2004,
5. Dalam ranah pelucutan senjata, Jepang lagi-lagi mengumumkan sebuah rancangan resolusi tentang pelucutan senjata nuklir kepada PBB

6. Memperkuat kontrol terhadap ekspor, termasuk meningkatkan penegakan hukum dengan menghormati kendali-kendali ekspor yang bertujuan mencegah arus keluar material-material dan teknologi ilegal yang dibutuhkan untuk produksi dan pengembangan senjata pemusnah massal. (*Diplomatic Blue Book 2003* 150; *Diplomatic Blue Book 2004* 6).

Pengalaman masa perang, trauma terhadap senjata nuklir, dan upaya sebagai negara pecinta damai telah menyebabkan Jepang terdorong secara aktif untuk berperan dalam proses penyelesaian isu nuklir Korea Utara melalui perundingan SPT. Pemerintah Jepang bertujuan untuk melindungi rakyatnya dari trauma masa lalu dan memberikan kenyamanan hidup dengan memastikan bahwa pemerintah negaranya akan bertindak sesuai dengan prinsip negara pecinta damai, yaitu dengan cara menyelesaikan konflik tidak melalui jalan kekerasan atau perang melainkan dengan jalan perdamaian melalui diplomasi dialog.

3.2 Pentingnya Isu Nuklir Korea Utara bagi Jepang

Isu nuklir Korea Utara menjadi sangat penting untuk Jepang karena pemerintah Jepang merasa keamanan negaranya terancam. Isu nuklir ini menjadi ancaman (*threat*) bagi Jepang karena kedekatan geografis negaranya dengan Korea Utara dan faktor historis yang penuh dengan konflik sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dan selalu curiga kepada Korea Utara.

Jenis ancaman (*threat*) yang dirasakan Jepang adalah ancaman serangan senjata dari negara tetangga yaitu kemungkinan serangan senjata nuklir dari Korea Utara. Ancaman ini menyebabkan *insecurity* atau perasaan tidak aman pada Jepang. Ancaman yang dirasakan oleh Jepang ini timbul dari persepsi yang dibangun dari tiga komponen berikut:

1. *Values* (nilai) :

Jepang lebih menghargai perdamaian daripada perang. Jepang selalu berusaha untuk mempertahankan kehidupan masyarakatnya di lingkungan yang damai, tenang, dan jauh dari konflik atau kekerasan. Permasalahan yang dialami Jepang dengan negara lain diselesaikan dengan proses dialog, bukan dengan cara kekerasan seperti perang, agresi ataupun invansi ke negara lain. Jepang tetap menjaga citra negaranya sebagai negara pecinta damai dan tidak ingin

selamanya dikenang sebagai negara kolonialis yang kejam dan tidak berkeprimanusiaan. Jepang sadar akan sulitnya memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan negara-negara tetangga bekas jajahannya, karena sampai sekarang pun negara-negara tersebut masih tetap memperlakukan hal-hal yang berkaitan dengan kolonialisme Jepang seperti tuntutan permintaan maaf Jepang dan pemberian kompensasi. Hal tersebut menjadi penghambat terciptanya hubungan bilateral yang harmonis dengan negara lain di Asia.

2. *Beliefs* (keyakinan) :

- a. Jepang meyakini bahwa senjata nuklir berbahaya dan mengancam keselamatan hidup manusia apabila jatuh ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Walaupun energi nuklir memiliki banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia sebagai energi alternatif tetapi apabila diubah fungsinya menjadi senjata nuklir dan digunakan secara tidak bertanggungjawab seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara, tentunya akan sangat berbahaya bagi keamanan kawasan dan juga dunia internasional.
- b. Jepang meyakini bahwa Korea Utara adalah negara tetangga yang berbahaya dan dapat mengancam keamanan Jepang. Hubungan kedua negara yang kurang harmonis semakin bermasalah karena isu nuklir Korea Utara dan belum dihasilkannya resolusi atas isu penculikan. Korea Utara pun terlihat setengah hati atau tidak sungguh-sungguh dalam melakukan usaha normalisasi hubungan dengan Jepang. Contohnya dalam usaha penyelesaian isu penculikan, Korea Utara bersikap tidak terbuka dengan tidak memberikan data yang sebenarnya atau menjelaskan dengan rinci apa maksud dan tujuan penculikan warga Jepang tersebut. Jasad yang diklaim sebagai jasad korban penculikan setelah diteliti DNA-nya oleh pihak Jepang, ternyata bukanlah jasad warga negara Jepang yang menjadi korban penculikan oleh Korea Utara. Walaupun Jepang selalu menuntut penyerahan para pelaku penculikan kepada pihak Jepang, Korea Utara sampai sekarang tidak pernah memenuhi tuntutan tersebut.

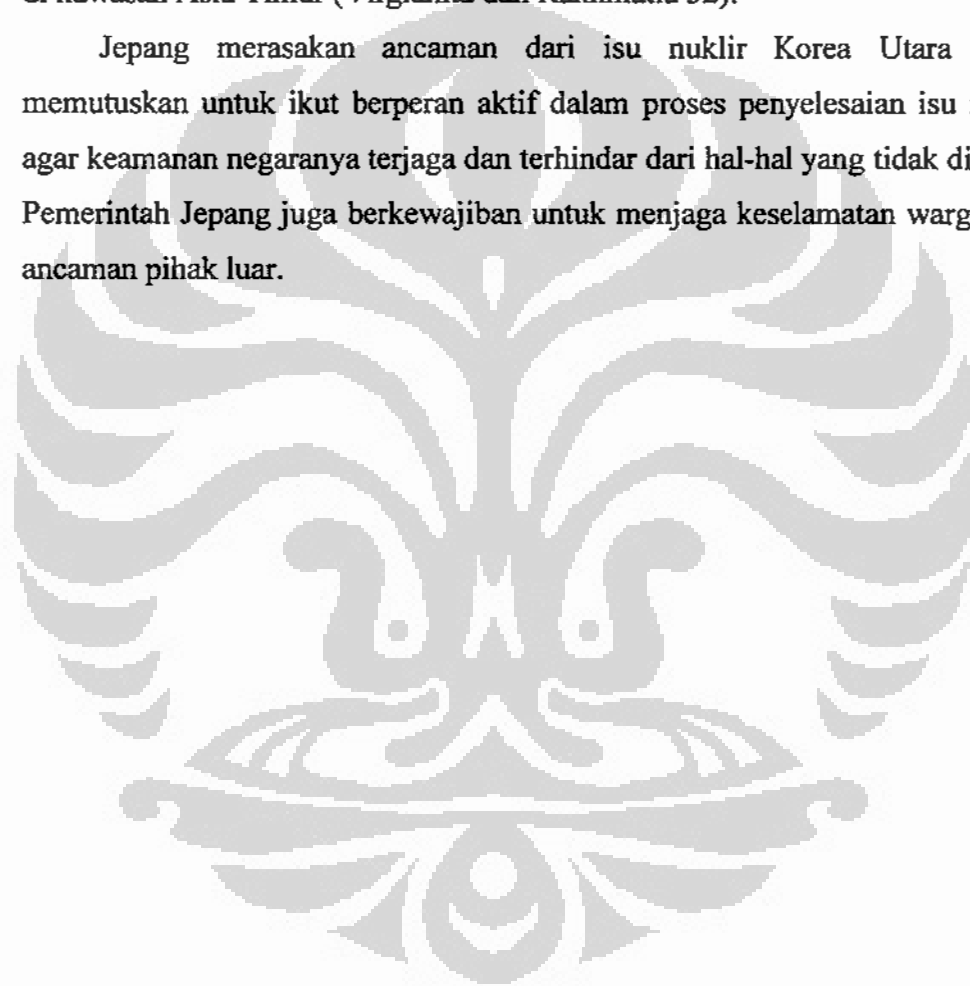
3. *Cognition* (pengamatan) :

- a. Jepang lebih menghargai perdamaian daripada perang karena pernah mengalami berbagai macam perang, contohnya perang Jepang-China, perang Jepang-Rusia dan Perang Dunia II. Bahkan pada masa lalu, Jepang adalah satu-satunya negara kolonial di Asia yang menjajah bangsa-bangsa lain di wilayah tersebut, sehingga pada masa sekarang Jepang mempunyai citra yang buruk karena ingatan bangsa-bangsa Asia akan kekejaman kolonial Jepang yang masih membekas di ingatan mereka. Hal ini menyebabkan hubungan bilateral yang tidak harmonis dengan negara-negara bekas jajahan Jepang, seperti kedua Korea dan China dan menyulitkan praktek politik luar negeri Jepang di wilayah Asia. Jepang lebih menghargai perdamaian daripada perang karena sadar akan kerugian perang yang pernah mereka alami baik pada masa lalu dan akibatnya masa sekarang. Untuk memastikan Jepang tidak akan terlibat kembali dalam perang dan dalam usahanya untuk memperbaiki citra bekas negara kolonial yang kejam, Jepang telah menyatakan dirinya sebagai negara pecinta damai.
- b. Jepang meyakini bahwa senjata nuklir berbahaya dan mengancam keselamatan hidup manusia karena pengalaman negara tersebut yang menjadi korban bom atom pada Perang Dunia II. Jepang merasakan penderitaan yang sangat dalam karena kejadian memakan banyak korban jiwa, korban yang terkena radiasi nuklir, dan menyisakan trauma yang berkepanjangan pada bangsa Jepang.
- c. Jepang meyakini bahwa Korea Utara adalah negara tetangga yang berbahaya dan dapat mengancam keamanan negaranya karena hubungan yang tidak harmonis dengan Korea Utara sehingga *mutual understanding* dan *mutual trust* sulit tercipta. Hubungan yang tidak harmonis ini tercipta akibat permasalahan masa lalu yang belum terselesaikan terkait kolonialisme Jepang, isu penculikan yang belum menemui resolusi akhir, dan isu nuklir Korea Utara ini. Korea Utara diyakini dapat melakukan tindakan provokatif yang membahayakan keamanan Jepang. Seperti percobaan peluncuran rudal atau misil yang dilakukan Korea Utara selalu menjadikan wilayah Jepang sebagai target.

Komponen-komponen di atas telah membentuk persepsi yang menimbulkan *insecurity* pada Jepang karena merasa keamanan negaranya terancam oleh isu nuklir Korea Utara.

Barry Buzan mengatakan bahwa sebagian besar negara lebih takut pada tetangga mereka dibanding *powers* dalam jarak jauh. Jepang termasuk negara yang merasakan hal tersebut, dengan memiliki permasalahan keamanan dengan Korea Utara, China, dan Korea Selatan yang tidak lain adalah negara tetangganya di kawasan Asia Timur (Virgianita dan Rakhmatia 32).

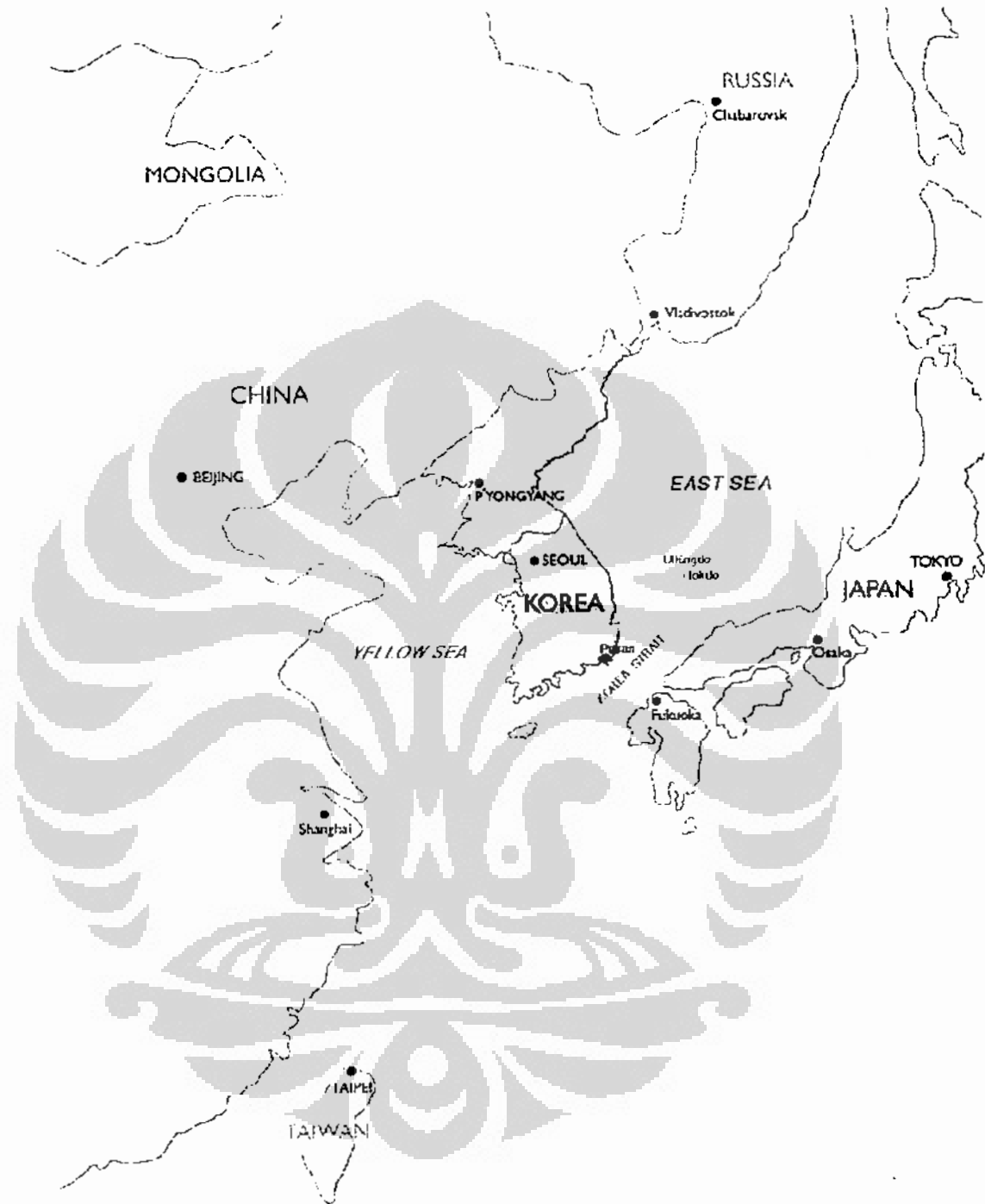
Jepang merasakan ancaman dari isu nuklir Korea Utara sehingga memutuskan untuk ikut berperan aktif dalam proses penyelesaian isu nuklir ini agar keamanan negaranya terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Jepang juga berkewajiban untuk menjaga keselamatan warganya dari ancaman pihak luar.



Tabel 3.1 Dinamika Nuklir Korea Utara

No.	Waktu	Kejadian
1.	Desember 2002	Mengusir inspektur IAEA setelah AS mengungkapkan adanya bukti program nuklir rahasia.
		Membekukan kesepakatan <i>Agreed Framework</i>
		Menyatakan mengembangkan senjata nuklir
2.	Maret 2003	Peluncuran misil-misil darat penghancur kapal laut ke lautan Jepang
3.	April 2003	Perundingan Tiga Pihak (<i>Three Party Talks</i>) dilaksanakan (AS-China-Korea Utara)
4.	Agustus 2003	<i>Six Party Talks</i> I
5.	Februari 2004	<i>Six Party Talks</i> II
6.	Juni 2004	<i>Six Party Talks</i> III
7.	Februari 2005	Mengakui telah memproduksi nuklir untuk pertahanan dan keamanan negaranya
8.	Mei 2005	Tes misil jarak dekat ke lautan Jepang
9.	Juli 2005	Bersedia kembali ke perundingan <i>Six Party Talks</i> IV
10.	November 2005	<i>Six Party Talks</i> V
11.	Juli 2006	Peluncuran tujuh buah misil yang melewati lautan Jepang
12.	Februari 2007	Korea Utara bersedia menutup reaktornya dengan imbalan bantuan
13.	Maret 2008	Peluncuran beberapa rudal jarak pendek yang jatuh di Laut Kuning
14.	Juli 2008	<i>Six Party Talks</i> VI
15.	Desember 2008	Menunda proses pelucutan fasilitas nuklirnya karena kompensasi ekonomi untuk negaranya telah tertunda
16.	April 2009	Peluncuran roket jarak jauh dari timur laut Korea Utara dan mencapai ruang udara Jepang dalam tujuh menit.
17.	Mei 2009	Meluncurkan roket multistahap dan melakukan uji coba nuklir

Gambar 3.1 Peta Asia Timur



"Japan and North Korea: Bones of Connection" *Asian Report* No. 100 27 Juni 2005 24

3.3 Opini Publik di Jepang

Jepang di masa lalu telah mengalami banyak kejadian yang jauh dari perdamaian: sebagai negara kolonial yang terkenal kejam, mengalami berbagai macam perang yang memakan banyak korban dan kerugian besar, serta korban bom atom sebagai bencana dashyat yang tak terlupakan di sepanjang sejarah Jepang dan dunia. Hal ini menyebabkan masyarakat Jepang lebih menghargai dan mencintai perdamaian agar mereka bisa hidup dengan tenang dan damai. Mereka percaya bahwa kekerasan dan perang tidak akan menyelesaikan masalah namun justru menimbulkan masalah baru. Perasaan ini tertanam sejak nenek moyang mereka pada generasi Perang Dunia II dan diturunkan pada generasi berikutnya sampai masyarakat Jepang pada masa kini.

Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh *Central Research Services (Chuo Chosasha)* pada Maret 2002 tentang ancaman bagi Jepang, empat jawaban terbanyak adalah: terorisme, serangan senjata pemusnah massal, gerilya dari luar negeri (secara spesifik termasuk kapal-kapal mencurigakan), dan serangan-serangan misil –yang kesemuanya secara jelas atau dapat diperdebatkan terkait dengan Korea Utara (Katzenstein et al. 146). Edwin O Reischauer mengatakan bahwa akibat pengalaman semasa dan sesudah perang, mayoritas orang Jepang tetap berpendirian menentang senjata nuklir, menolak kekuatan militer dalam bentuk apapun, bangga akan konstitusi anti perang negaranya, dan menentang penggunaan pasukan Jepang dimanapun di luar negaranya (367).

Oleh karena itu, isu nuklir Korea Utara menjadi persoalan yang sangat krusial bagi masyarakat Jepang dan mereka berharap agar pemerintahnya dapat terus berperan aktif dalam proses penyelesaian isu tersebut. Masyarakat Jepang sepenuhnya mendukung kontribusi pemerintahnya dalam perundingan SPT dan berharap pada terciptanya solusi yang berdampak positif bagi mereka.

Berbagai surat kabar di Jepang pada edisi Minggu 25 Mei 2003 secara serentak menyetujui pengenaan tindakan keras atas Korea Utara. Mereka sepakat dengan usulan Presiden AS George Bush bahwa cara terbaik menghadapi Korut yang bersikukuh dengan program nuklirnya adalah memberi tindakan lebih keras. Publik Jepang juga mendukung permintaan Bush agar Korea Utara menunjukkan sikap kooperatif dan berperangai baik untuk bisa lebih dipercayai negara-negara

lain (“Publik Jepang” 1). Berita ini menunjukkan bahwa masyarakat Jepang menganggap Korea Utara sebagai pemerintahan yang sulit ditangani sehingga isu nuklir juga menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Maka masyarakat Jepang mendukung pemerintahnya untuk melakukan tindakan yang diperlukan agar secepatnya menyelesaikan isu nuklir tersebut. Opini publik di Jepang sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan luar negeri di Jepang. Dalam kaitannya dengan Korea Utara, terdapat dua golongan yang bertentangan yaitu: mayoritas rakyat Jepang yang menganggap Korea Utara adalah ancaman besar bagi negaranya sehingga harus segera ditangani dengan bertindak tegas terhadap pemerintah Korea Utara dan komunitas Korea di Jepang yang mengharapkan pemerintah Jepang memberikan solusi terbaik yang tidak merugikan pihak Korea Utara.

3.4 Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Korea Utara

Sense of survival masyarakat Jepang akibat berbagai kondisi dan situasi yang dialaminya pada masa lalu telah tertanam pada praktek politik pemerintah Jepang masa kini. Jepang dalam menjaga kelangsungan pemerintahannya dalam skala regional dan global menjalankan diplomasi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan untuk menghadapi berbagai macam isu penting yang menyangkut kepentingan nasional Jepang di dunia internasional. Sarana diplomasi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan dikeluarkannya kebijakan luar negeri dalam praktek politik luar negeri Jepang di dunia.

Tujuan dasar dari kebijakan luar negeri Jepang adalah untuk berkontribusi kepada perdamaian dunia dan stabilitas serta kemajuan dari seluruh komunitas internasional dengan menjalankan kerjasama dan dialog antara negara-negara di dunia (“The Japan” 28). Di kawasan Asia Pasifik, Jepang menjalankan politik luar negerinya dengan menerapkan kerangka dialog dan kerjasama bilateral serta multilateral untuk meningkatkan lingkungan keamanan kawasan. Dalam menerapkannya Jepang memiliki tiga prinsip dasar: menjamin pencegahan terhadap tindakan apapun yang dapat mengganggu stabilitas wilayah Asia Pasifik dengan mengacu kepada Perjanjian Keamanan Jepang-AS, memberi bantuan kepada negara-negara Asia sebagai bentuk permintaan maaf dan penyesalan yang

mendalam didasari rasa malu akibat fakta sejarah Jepang yang telah menyebabkan kerusakan serta penderitaan negara-negara Asia pada masa lalu, mengadakan kerjasama yang luas dalam bidang keuangan, kerjasama ekonomi, penanaman modal, isu-isu transnasional, untuk membantu seluruh kawasan mencapai perkembangan yang lebih baik (*Diplomatic Blue Book 2002* 96; *Diplomatic Blue Book 2006* 18). Menurut Kuniko Ashikawa, kerangka multilateralisme yang diterapkan Jepang pada negara-negara tetangganya di Asia diasumsikan dapat membantu meredakan kekhawatiran negara-negara Asia terhadap kemungkinan keinginan Jepang untuk mendominasi kawasan, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik dan bahkan secara militer (418).

Keamanan atau *security* telah menjadi isu pokok di dalam kebijakan luar negeri Jepang pasca Perang Dingin dan secara sederhana, kebijakan strategis Jepang dapat dipandang sebagai sebuah dimensi dari hubungan Jepang-AS (Hellmann 321). Maka isu nuklir Korea Utara merupakan isu penting dan menjadi prioritas di dalam politik luar negeri Jepang karena faktor keamanan serta merupakan tugas Jepang untuk melakukan peranan dalam isu tersebut sebagai sekutu AS yang kepentingannya sejalan dengan kepentingan Jepang.

Arus kebijakan Jepang dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara adalah untuk menciptakan usaha-usaha memperbaiki hubungan abnormal pascaperang dengan Korea Utara dalam koordinasi rapat dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, dalam sebuah tatanan yang akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Timur Laut (*Diplomatic Blue Book 2002* 35).

Dalam kaitannya dengan isu nuklir Korea Utara, seperti telah diuraikan di atas bahwa Jepang merasa keamanannya terancam karena adanya ancaman serangan senjata nuklir dari Korea Utara, maka pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara. Kebijakan luar negeri tersebut bertujuan untuk menyelesaikan isu nuklir Korea Utara sehingga keamanan Jepang dan kawasannya terbebas dari ancaman, serta dapat melakukan hubungan dengan Korea Utara agar dapat melakukan perundingan mengenai penyelesaian isu penculikan.

Kebijakan-kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang terhadap Korea Utara adalah:

1. Melakukan diplomasi dialog dan tekanan

a. Diplomasi dialog

Sesuai dengan tujuan dasar kebijakan luar negeri Jepang yang telah disebutkan sebelumnya, untuk berkontribusi kepada perdamaian dunia dan stabilitas dengan menjalankan kerja sama dan dialog antara negara-negara di dunia, Jepang menjalankan diplomasi dialog terhadap Korea Utara. Diplomasi dialog dilakukan dengan mengadakan perundingan multilateral dan bilateral. Diplomasi multilateral dengan ikut serta dalam proses SPT dan diplomasi bilateral dengan mengadakan perundingan atau perjanjian dengan Korea Utara mengenai isu yang sedang berlangsung.

b. Diplomasi tekanan

Diplomasi dialog yang dijalankan Jepang tidak menghasilkan hasil maksimal yang diinginkan, maka Jepang kemudian melakukan diplomasi tekanan terhadap Korea Utara. Diplomasi tekanan dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri berupa sanksi kepada Korea Utara apabila Korea Utara melakukan tindakan yang melanggar kesepakatan atau bertindak provokatif.

Pada kasus-kasus regional umumnya, sanksi-sanksi dapat membuat negara-negara terkait untuk menerima persetujuan-persetujuan secara strategis dan politis; yang menyiratkan tingkat kekuatan asimetris secara moderat (Barton 146).

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang terhadap Korea Utara sangat bergantung pada bagaimana Korea Utara bersikap dan bertindak. Jika Korea Utara dianggap melakukan tindakan provokatif atau melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama, maka dapat dipastikan Jepang akan segera mengeluarkan sanksi baru terhadap Korea Utara; baik sanksi yang sama sekali baru maupun memperpanjang sanksi yang telah berlaku sebelumnya.

Tabel 3.2 Sanksi-sanksi Jepang kepada Korea Utara

No.	Tahun	Sanksi	Penyebab
1.	1998	Menghentikan bantuan pangan dan energy	Peluncuran percobaan misil yang melewati Jepang
2.	2003	Menghentikan bantuan pangan sampai tahun 2004	Memburuknya hubungan kedua negara akibat isu penculikan
3.	2004	Menghentikan bantuan pangan	Hasil tes DNA dari jenazah yang diserahkan Korea Utara ternyata bukan wanita Jepang korban penculikan yang hilang
4.	2006	Memperketat pengawasan dana ke Korea Utara	Tidak ada kemajuan dalam proses denuklirisasi dan dalam penyelidikan isu penculikan
		Melarang impor dari Korea Utara	
		Melarang warga negara dan kapal Korea Utara ke Jepang	
5.	2009	Mengurangi jumlah dana ke Korea Utara dari 30 juta yen menjadi 10 juta yen	Peluncuran roket Korea Utara pada 5 April 2009
		Memperpanjang sanksi tahun 2006	

(Efron 1; Manyin 24; "Jepang Perpanjang" 1, "Japan Freezes" 1) Telah diolah kembali.

2. Menerapkan diplomasi ekonomi

Glenn D. Hook et al mengatakan bahwa kekuatan Jepang di dunia telah terbentuk dari penggunaan kekuatan ekonomi daripada kekuatan militer. Kekuatan ekonomi adalah bentuk kekuatan yang sering digunakan Jepang untuk memenuhi kepentingan nasional negara dan rakyatnya serta untuk membuat keberadaannya diakui di tingkat regional maupun global (83).

Oleh karena itu, dalam menghadapi Korea Utara Jepang menerapkan diplomasi ekonomi dengan memberikan bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Berlawanan dengan pemberian sanksi, apabila Korea Utara bersikap atau bertindak sejalan dengan kepentingan nasional Jepang, mematuhi kesepakatan bersama, bertindak kooperatif, dan tidak provokatif; maka Jepang akan memberikan bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Jepang adalah negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat baik, sedangkan Korea Utara adalah negara miskin dimana banyak rakyatnya menderita kelaparan. Dengan keadaan ekonomi yang jauh lebih baik dari Korea Utara, Jepang menjadikan bantuan luar negeri sebagai alat yang paling ampuh untuk memberikan pengaruh ekonomi kepada Korea Utara.

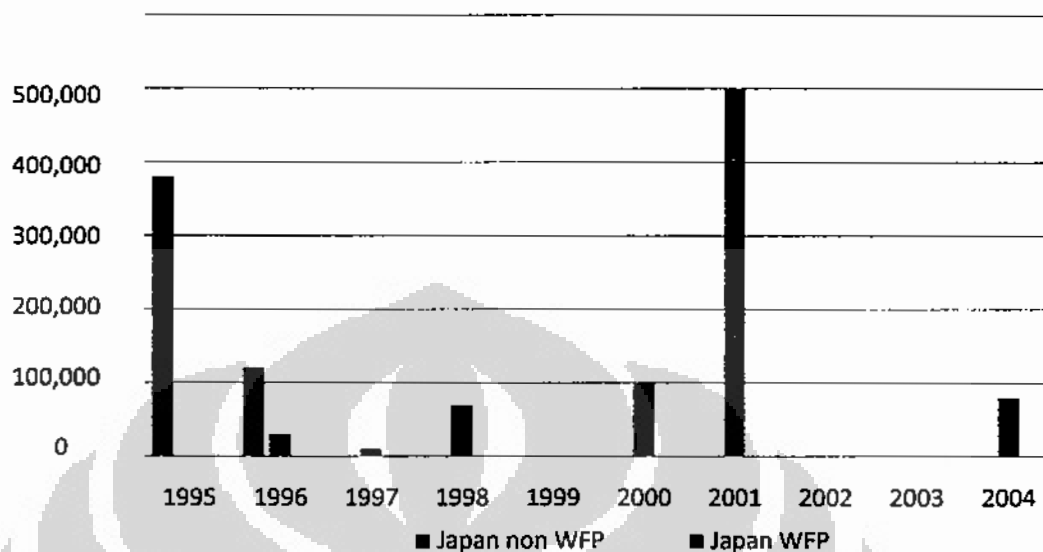
Bantuan-bantuan luar negeri yang diberikan Jepang untuk Korea Utara ini dapat dikatakan sebagai imbalan atas tindakan Korea Utara yang dianggap sesuai dengan keinginan pemerintahan Jepang dan telah sejalan dengan kepentingan nasional Jepang. Seperti yang tertulis dalam *Diplomatic Blue Book 2005* bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan Kim Jong Il, Perdana Menteri Koizumi mengumumkan bahwa lima orang anggota keluarga korban penculikan yang telah dipulangkan ke Jepang akan dikembalikan kewarganegaraannya dan Jepang akan menyediakan 250.000 ton bantuan pangan melalui *UN World Food Programme* (WFP) kepada Korea Utara (268). Jepang terkesan mengaitkan pemberian bantuan luar negerinya pada situasi hubungannya dengan Korea Utara.

Tabel 3.3 Bantuan Luar Negeri Jepang ke Korea Utara

No.	Waktu	Jenis Bantuan	Jumlah
1.	Juni 1995	Bantuan pangan (beras)	300.000 ton
2.	September 1995	Bantuan kemanusiaan	260.000 dolar AS
		Bantuan pangan (beras)	120.000 dolar AS
		Bantuan obat-obatan	120.000 dolar AS
3.	Oktober 1995	Bantuan pangan (beras)	200.000 ton
4.	Juni 1996	Bantuan pangan (beras)	250.000 dolar AS
		Bantuan obat-obatan	750.000 dolar AS
5.	Mei 1997	Bantuan pangan (beras)	300.000 ton
6.	Oktober 1997	Bantuan pangan (beras)	67.000 ton
		Bantuan obat-obatan	94.000.000 yen
7.	Maret 2000	Bantuan pangan (beras)	100.000 ton
8.	Oktober 2000	Bantuan pangan (beras)	500.000 ton
9.	2001	Bantuan pangan (beras)	500.000 metrik ton
10.	April 2004	Sumbangan untuk bencana ledakan kereta api di Ryongchon	100.000 dolar AS
		Perlengkapan pengobatan darurat dan obat-obatan	100.000 dolar AS
11.	Agustus 2004	Bantuan pangan (beras)	125.000 ton
		Bantuan obat-obatan	7.000.000 dolar AS
		Peralatan kedokteran	2.000.000 dolar AS

(Kenji 11; Manyin 24; Soderberg 451; *Diplomatic Blue Book 2005* 22, 271). Telah diolah kembali.

Gambar 3.2 Grafik Bantuan Luar Negeri Jepang ke Korea Utara 1995-2004



Manyin, Mark E. "Foreign Assistance to North Korea". CRS Report for Congress. 26 May 2005:24.

3.5 Diplomasi Jepang: Kombinasi antara Diplomasi Multilateral dan Diplomasi Bilateral

3.5.1 Diplomasi Multilateral: *Six Party Talks*

Jepang menjalankan diplomasi multilateral dalam penyelesaian isu nuklir Korea Utara dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri dimana Jepang ikut berperan aktif dalam pertemuan enam pihak atau SPT. Jepang melakukan pendekatan multilateral dengan bergabung dan bekerjasama dengan AS, Rusia, China, dan Korea Selatan untuk bersama-sama berupaya menyelesaikan isu nuklir Korea Utara.

Dalam diplomasi multilateral ini, selain membahas isu nuklir Jepang juga memprioritaskan kepentingan nasionalnya sendiri yang sebenarnya tidak termasuk dalam topik utama SPT; yaitu dengan mendesak Korea Utara agar dengan segera menyelesaikan isu penculikan warga Jepang oleh negara komunis tersebut. Mengingat bahwa pemerintah Korea Utara mempunyai sifat tertutup dan sulit diajak kompromi atau bekerjasama, maka berpartisipasi dalam SPT merupakan salah satu cara Jepang untuk menjangkau Korea Utara.

Disini terlihat bahwa sebenarnya Jepang mempunyai maksud terselubung dalam keikutsertaannya dalam SPT. Jepang memanfaatkan perundingan ini untuk memiliki akses kepada Korea Utara agar dapat mendapat perhatian dan meminta Korea Utara memberikan penyelesaian isu penculikan yang termasuk prioritas diplomasi Jepang. Jepang juga memanfaatkan posisi AS sebagai sekutunya yang notabene adalah target utama Korea Utara dalam usaha pemerasan dengan menggunakan isu nuklir sebagai *bargaining chip*. Sebagai sekutu Jepang, AS memberikan dukungannya kepada Jepang dan meminta agar Korea Utara menyelesaikan isu penculikan dengan Jepang melalui perundingan dua negara.

Bahkan keinginan Jepang yang bersikeras untuk melakukan pembahasan mengenai isu penculikan di dalam SPT telah menimbulkan kritik dari negara-negara peserta lain (kecuali AS) sebagai tindakan yang tidak produktif dan mengganggu dalam proses SPT tersebut, yang menempatkan Jepang pada posisi yang terisolasi, walau secara tak disengaja (Ashizawa 411).

Walaupun telah dilakukan upaya-upaya diplomatik yang luas untuk memfasilitasi dan menciptakan SPT, kebijakan domestik yang terbatas, perbedaan prioritas, dan analogi-analogi konflik historis antara negara-negara SPT telah menyebabkan banyak perbedaan perspektif dalam meja perundingan multilateral (Park 75).

SPT tidak berjalan dengan lancar dan bahkan pertemuan yang terakhir telah ditunda. Hal ini disebabkan karena para peserta SPT memiliki prioritas yang berbeda dan kadang berseberangan dengan peserta lainnya. Masing-masing bersikeras berusaha untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. AS menginginkan pembakaran program nuklir Korea Utara tetapi enggan untuk memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Korea Utara, Jepang mementingkan isu penculikan di samping penyelesaian isu nuklir yang mengancam wilayahnya, dan Korea Utara yang terus mempergunakan isu nuklirnya sebagai *bargaining chip* tanpa mengindahkan perdamaian kawasan bahkan internasional. Sedangkan China lebih bersifat mediator dan Rusia lebih mengarah kepada kepentingan geopolitik dan geostrategisnya.

3.5.2 Diplomasi Bilateral dengan Korea Utara

Selain melakukan diplomasi dengan pendekatan multilateral melalui SPT, Jepang juga melakukan diplomasi bilateral dengan Korea Utara. Upaya-upaya diplomasi bilateral telah dilakukan oleh Jepang sebelum krisis nuklir terjadi, tetapi perundingan-perundingan tersebut tidak menghasilkan kemajuan yang nyata atas perbaikan hubungan antara kedua negara.

Hal ini disebabkan karena masing-masing negara terlalu memprioritaskan kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa mengindahkan kepentingan di lain pihak. Kedua pihak bersikeras agar tuntutan mereka dipenuhi: Korea Utara menuntut kompensasi dan permintaan maaf resmi dari Jepang akibat praktek kolonisasi Jepang pada masa lalu, sedangkan Jepang menuntut diselesaikannya isu penculikan hingga tuntas dengan meminta informasi yang lengkap dan terpercaya tentang kasus ini, serta pengembalian keluarga korban penculikan dari Korea Utara.

Berikut ini adalah perundingan dan perjanjian bilateral antara Jepang dan Korea Utara:

1. Perundingan Normalisasi (*Normalization Talks*)

Tabel 3.4 Perundingan Normalisasi Jepang- Korea Utara

No	Waktu	Perjanjian atau Perundingan	Lokasi
1.	2-4 November 1990	Persiapan Perundingan Normalisasi I	Beijing
2.	17 November 1990	Persiapan Perundingan Normalisasi II	Beijing
3.	15-17 Desember 1990	Persiapan Perundingan Normalisasi III	Beijing
4.	30-31 Januari 1991	Perundingan Normalisasi I	Pyongyang
5.	11-12 Maret 1991	Perundingan Normalisasi II	Tokyo
6.	20-22 Mei 1991	Perundingan Normalisasi III	Beijing
7.	30 Agustus 1991	Perundingan Normalisasi IV	Beijing
8.	18-20 November 1991	Perundingan Normalisasi V	Beijing
9.	30 Januari 1992	Perundingan Normalisasi VI	Beijing
10.	13-15 Mei 1992	Perundingan Normalisasi VII	Beijing
11.	5 November 1992	Perundingan Normalisasi VIII ditunda	
12.	4 April 2000	Perundingan Normalisasi dilanjutkan	
13.	29-30 Oktober 2002	Perundingan Normalisasi	Malaysia

(Hook et al. 466, 476-478, 487, 492, 494). Telah diolah kembali.

Perundingan normalisasi kemudian dilanjutkan pada tahun 2007 sebanyak dua kali tetapi tetap tidak ada hasil yang nyata dari isu-isu yang sedang berlangsung antar kedua negara (*Diplomatic Blue Book* 2008 12).

2. Perundingan mengenai isu penculikan

Selama pertemuan SPT berlangsung, selain membahas tentang isu nuklir Jepang juga mendesak Korea Utara agar mengadakan dialog untuk menyelesaikan masalah penculikan. Usaha Jepang ini membawa hasil dengan terlaksananya beberapa perundingan bilateral dengan Korea Utara mengenai masalah penculikan yang telah lama menjadi batu sandungan bagi terciptanya hubungan yang harmonis antar kedua negara.

Tabel 3.5 Perundingan Isu Penculikan Jepang-Korea Utara

No	Waktu	Tuntutan Jepang
1.	Agustus 2003	Penyelidikan lengkap dan pengembalian keluarga korban penculikan ke Jepang
2.	Februari 2004	Pengembalian lima korban penculikan kepada keluarga Jepang dan sepuluh orang yang keberadaannya tidak diketahui.
3.	November 2005	Pengembalian korban penculikan yang masih hidup dan penyerahan para tersangka penculikan ke Jepang
4.	Desember 2005	Konsultasi tentang isu penculikan, isu nuklir, misil, dan isu keamanan yang terkait, serta perundingan normalisasi
5.	Februari 2006	Membahas isu penculikan, nuklir, dan keamanan kawasan

(“MOFA”; *Diplomatic Blue Book 2006* 21-22). Telah diolah kembali.

3. *Japan-North Korea Working Level Consultation*

Dilaksanakan pada Februari, Mei, Juli dan Agustus 2004, September dan Desember 2005, Agustus 2008, dengan topik perundingan antara lain:

- a. Isu penculikan
- b. Isu nuklir
- c. Masalah kemanusiaan
- d. Usaha normalisasi kedua negara

(“MOFA”; *Diplomatic Blue Book* 2005 22, 267, 273)

4. Deklarasi Pyongyang (September 2002)

Perdana Menteri Koizumi pernah melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Pyongyang pada September 2002, untuk menawarkan suntikan ekonomi mendasar dalam upaya untuk meningkatkan normalisasi diplomatik Jepang-Korea Utara (Park 85). Setelah pertemuan ini, hubungan Jepang dan Korea Utara menunjukkan kemajuan dengan terciptanya Deklarasi Pyongyang yang disepakati kedua negara.

Isi Perjanjian Pyongyang adalah:

- a. Kedua pihak menyatakan bahwa, sesuai dengan semangat dan prinsip-prinsip dasar dalam Deklarasi, mereka akan melakukan usaha apapun untuk awal normalisasi hubungan mereka, dan memutuskan akan melanjutkan perundingan normalisasi Jepang dan Korea Utara pada Oktober 2002.

Kedua pihak menunjukkan keinginan yang kuat bahwa mereka akan dengan tulus mengatasi masalah-masalah besar antara Jepang dan Korea Utara berdasarkan kepercayaan mutual mereka dalam jalur pencapaian normalisasi.

- b. Pihak Jepang menghargai –dengan rasa malu– fakta-fakta sejarah bahwa Jepang telah mengakibatkan kerusakan parah dan penderitaan pada rakyat Korea melalui pemerintahan kolonialnya di masa lalu, dan menyatakan penyesalan mendalam dan permohonan maaf sepenuh hati.

Kedua pihak memiliki pemahaman bahwa, menyediakan kerjasama ekonomi setelah normalisasi pihak Jepang dan Korea Utara, termasuk bantuan hibah, pinjaman jangka panjang dengan tingkat bunga rendah dan asistensi lain seperti bantuan kemanusiaan melalui organisasi-organisasi internasional, melalui periode yang disepakati kedua belah pihak, dan penyediaan pinjaman-pinjaman serta kredit lain melalui institusi keuangan seperti *Japan Bank for International Co-operation* dengan pandangan untuk mendukung aktivitas ekonomi swasta, terkait dengan konsistensi semangat Deklarasi ini, dan memutuskan bahwa mereka akan secara tulus mendiskusikan ukuran-ukuran dan isi spesifik kerjasama ekonomi dalam perbincangan normalisasi.

Kedua pihak sesuai prinsip dasar bahwa ketika hubungan bilateral telah dinormalisasi maka Jepang dan Korea Utara akan secara mutual mengabaikan semua kepemilikan dan tuntutan-tuntutan dari masing-masing negara yang telah menimbulkan masalah-masalah yang terjadi sebelum 15 Agustus 1945 dan memutuskan bahwa mereka akan mendiskusikan isu kepemilikan dan tuntutan mendasar dalam pembicaraan normalisasi. Kedua pihak memutuskan bahwa mereka akan dengan tulus mendiskusikan topik status warga Korea di Jepang dan topik kepemilikan budaya.

c. Kedua pihak memastikan bahwa mereka akan merujuk pada hukum internasional dan tidak akan melakukan aksi-aksi yang mengancam keamanan pihak lain. Dengan penghargaan pada isu-isu besar terkait kehidupan dan keamanan warga Jepang, pihak Korea memastikan bahwa dibutuhkan upaya-upaya khusus agar insiden-insiden yang disesalkan tersebut –yang terjadi pada hubungan bilateral abnormal– tidak akan terjadi lagi di masa depan.

d. Kedua pihak memastikan bahwa mereka akan saling bekerjasama untuk menjaga dan memperkuat kedamaian dan stabilitas di Asia Timur.

Kedua pihak memastikan kepentingan menerapkan hubungan-hubungan kooperatif yang didasari kepercayaan mutual diantara para negara yang terkait di wilayah ini, dan memiliki pandangan yang sama bahwa kerangka kerja sangat dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan keyakinan diantara negara-negara di wilayah ini, sebagaimana hubungan diantara mereka dinormalisasi.

Kedua pihak memastikan bahwa, demi keseluruhan resolusi isu-isu nuklir di Semenanjung Korea, mereka akan merujuk pada semua persetujuan internasional terkait. Kedua pihak juga memastikan kebutuhan pemecahan masalah-masalah keamanan termasuk nuklir dan isu missil melalui dialog-dialog diantara para negara terkait (“MOFA”).

Deklarasi Pyongyang ini kemudian menjadi prinsip dasar Jepang dan Korea Utara di kemudian hari dalam melakukan upaya-upaya untuk menormalisasi hubungan dan menyelesaikan isu-isu yang sedang berlangsung.

Jepang telah menjalankan diplomasi multilateral dan bilateral terhadap Korea Utara dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun, tetapi hasil yang diinginkan oleh Jepang masih belum tercapai dengan maksimal. Perilaku pemerintahan Korea Utara yang cenderung tidak kooperatif, tidak konsisten, bertindak semena-mena, sukar ditebak, dan provokatif juga menyebabkan terhambatnya proses normalisasi dan penyelesaian isu-isu yang berlangsung seperti isu nuklir dan penculikan, sehingga perbaikan hubungan kedua negara pun tidak kunjung terwujud.

Korea Utara cenderung bersikap tidak konsisten dalam keseluruhan proses negoisasi SPT. Pada krisis nuklir Korea Utara yang pertama (tahun 1993-1994) permasalahan telah selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian *Agreed Framework* dengan AS. Berdasarkan perjanjian tersebut, Korea Utara bersedia untuk membongkar seluruh program nuklirnya dan sebagai imbalannya AS bekerjasama dengan Jepang membentuk KEDO sebagai lembaga yang mengatur suplai energi ke Korea Utara. Tetapi pada tahun 1998, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir Nodong dan Taepodong 1 yang melewati lautan Jepang dan jatuh di lautan Pasifik. Korea Utara menyatakan membekukan perjanjian tersebut pada tahun 2002 dengan alasan AS telah memberhentikan bantuan ke Korea Utara secara sepihak. Kemudian Korea Utara melakukan peluncuran misil-misil darat penghancur kapal laut ke lautan Jepang setahun sesudahnya.

Pada tahun 2003, Korea Utara melunak dengan bersedia mengikuti Perundingan Tiga Pihak (*Three Party Talks*) yang berlanjut diadakannya SPT pertama sampai SPT ketiga dari tahun 2003 sampai 2004. Setelah berhasil diadakan perundingan tersebut, setahun kemudian Korea Utara kembali menunjukkan sikap yang tidak konsisten yang provokatif yaitu melakukan tes misil jarak dekat ke lautan Jepang pada Mei 2005.

Sebulan sesudah tes misil tersebut, Korea Utara kembali bersikap melunak dengan bersedia kembali pada perundingan SPT keempat dan kelima sepanjang tahun 2005. Pada SPT keempat perundingan berjalan dengan baik, Korea Utara pun berjanji untuk melakukan pembongkaran yang dapat diverifikasi atas semua senjata dan program nuklirnya. Tetapi pada SPT kelima, akibat pembekuan rekening Korea Utara di Macao dibekukan oleh AS, Korea Utara menarik diri dari perundingan ini. Sebagai aksi protesnya, Korea Utara kemudian meluncurkan

tujuh buah misil yang melewati lautan Jepang. Tindakan ini kembali memanasakan situasi di Semenanjung Korea sekaligus memperburuk hubungan Korea Utara dengan AS dan Jepang. SPT pun ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena tidak ada kemajuan nyata yang berarti dan Korea Utara menolak hadir dalam perundingan ini.

Pada Februari 2007, disusun sebuah perjanjian dimana berdasarkan perjanjian tersebut Korea Utara akan mendapat bantuan kemanusiaan, energi, dan ekonomi sebagai imbalan untuk melakukan pembongkaran seluruh fasilitas nuklir yang ada. Walaupun telah terikat perjanjian sebelumnya, pada Maret 2008 Korea Utara tetap melakukan peluncuran beberapa rudal jarak pendek yang jatuh di Laut Kuning. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 2007 dan kembali memanasakan situasi kawasan dan internasional.

Walaupun SPT keenam berhasil dilangsungkan pada Juli 2008, Korea Utara kembali menunjukkan perubahan sikap dengan memutuskan untuk menunda pembongkaran fasilitas nuklirnya karena merasa bantuan yang dijanjikan tertunda. Korea Utara juga melakukan praktek peluncuran roket multistap dan melakukan uji coba nuklir pada April dan Mei tahun ini.

Melalui SPT, negara-negara peserta SPT lainnya berhasil melakukan perundingan dengan Korea Utara dan beberapa perjanjian telah dibuat dalam rangka penyelesaian isu nuklir Korea Utara. Inti dari perjanjian-perjanjian tersebut adalah Korea Utara akan melakukan pembongkaran seluruh fasilitas nuklirnya dan negara-negara peserta SPT akan memberikan bantuan pangan, ekonomi, kemanusiaan, dan energi kepada Korea Utara. Tetapi walaupun SPT telah selesai dilaksanakan dan perjanjian telah disepakati, Korea Utara selalu melakukan tindakan yang melanggar perjanjian tersebut. Korea Utara selalu menunjukkan sikap tidak konsisten dalam keseluruhan proses penyelesaian isu nuklir ini. Dalam satu waktu Korea Utara bersikap lunak dengan bersedia mengikuti perundingan dan menyatakan akan melakukan pembongkaran fasilitas nuklir yang dapat diverifikasi, tetapi di waktu yang lain Korea Utara akan melakukan tindakan provokatif yang menambah ketegangan di kawasan dan dunia internasional. Sikap tidak konsisten Korea Utara tersebut adalah hambatan utama dalam proses penyelesaian isu nuklir Korea Utara melalui SPT.

3.6 Efektifitas Diplomasi Jepang dalam Isu Nuklir Korea Utara

Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara, Jepang telah mengeluarkan berbagai kebijakan luar negeri untuk melaksanakan diplomasi multilateral dan bilateral. Dengan melakukan dialog multilateral dan bilateral serta memberikan bantuan luar negeri atau sanksi kepada Korea Utara, Jepang mengharapkan hasil yang maksimal dapat memberi keuntungan bagi kepentingan nasionalnya; yaitu agar negaranya terbebas dari ancaman nuklir Korea Utara dan tuntasnya isu penculikan warga Jepang yang dilakukan oleh Korea Utara.

Menghadapi kebijakan-kebijakan luar negeri yang diberikan Jepang kepada negaranya, Korea Utara terlihat tidak terlalu memenuhi keinginan Jepang karena tawar menawar dengan Jepang bukan merupakan prioritas utama bagi pemerintahan Korea Utara. Sebaliknya, penyelesaian isu nuklir dan penculikan bagi Jepang adalah salah satu prioritas dalam diplomasi negaranya. Korea Utara lebih mementingkan target utama pemerasaannya menggunakan isu nuklir ini, yaitu AS. Korea Utara juga cenderung bersikap tidak konsisten. Sering terjadi dimana walaupun Korea Utara telah menyepakati perjanjian baik dengan AS, Jepang, ataupun dalam SPT, di kemudian hari Korea Utara pasti akan kembali melakukan pelanggaran atau tindakan provokatif lainnya.

Korea Utara terkesan selalu menakut-nakuti Jepang dengan percobaan-percobaan peluncuran misil dan roket agar Jepang merasa terancam dan memperhatikan eksistensi militer Korea Utara, serta membuat Jepang harus memperhatikan bahkan memenuhi keinginannya. Korea Utara juga cenderung bersikap sangat tidak kooperatif dan melakukan tindakan-tindakan provokatif yang justru menambah ketegangan di Semenanjung Korea dan memperburuk hubungannya dengan Jepang sehingga normalisasi hubungan sulit diupayakan.

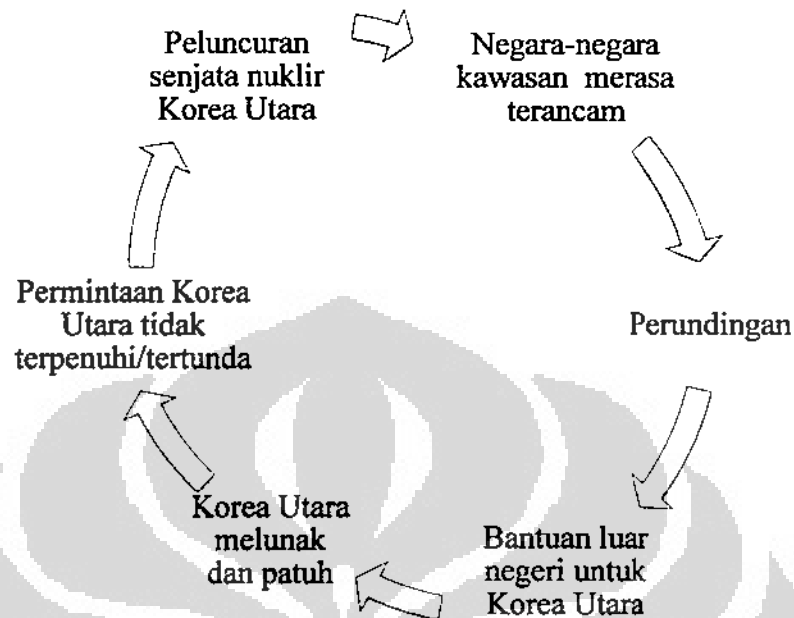
Korea Utara melakukan perubahan sikap yang lebih baik dan menjadi kooperatif, serta mengikuti kesepakatan dalam perjanjian; apabila bantuan yang dijanjikan telah disalurkan ke negaranya. Tetapi sikap ini pun tidak selalu konsisten karena Korea Utara dapat mengubah keputusannya dengan tiba-tiba dan melakukan tindakan profokatif yang melenceng dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Korea Utara justru memanfaatkan perasaan terancam yang

dirasakan oleh Jepang dan AS untuk memeras kedua negara tersebut agar mencapai tujuannya; yaitu penyediaan berbagai kebutuhan domestik yang sangat diperlukan mengingat keadaan Korea Utara yang banyak mengalami kekurangan pangan dan energi. Pemerintahan Kim Jong Il terkesan tidak kooperatif, tidak konsisten, dan sulit diajak kompromi sehingga sangat menyulitkan Jepang dan negara-negara peserta SPT untuk menemukan solusi yang tepat dalam isu nuklir Korea Utara ini.

Diplomasi yang dijalankan Jepang melalui kebijakan luar negerinya kepada Korea Utara tidak sepenuhnya berhasil. Indikator keberhasilan diplomasi Jepang yang dijalankan terhadap Korea Utara adalah bagaimana perubahan sikap dari pemerintah Korea Utara. Apakah Korea Utara menunjukkan sikap yang lunak dan bersedia mematuhi perjanjian yang disepakati; ataukah tetap bersikukuh dengan sikap sewenang-wenangnya setelah menerima kebijakan luar negeri dari Jepang.

Proses diplomasi melalui dialog bilateral maupun multilateral yang dilakukan Jepang dengan Korea Utara menunjukkan kemajuan pada awalnya, tetapi di kemudian hari Korea Utara kembali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. Begitu pun dengan diplomasi tekanan melalui pemberian berbagai macam sanksi pada Korea Utara; seperti penghentian suplai energi dan pangan juga menghasilkan perubahan baik pada awalnya saja, tetapi di kemudian hari kembali menuai sikap tidak konsisten dan tidak kooperatif dari Korea Utara. Diplomasi tekanan yang dijalankan Jepang ini tidak terlalu efektif karena walaupun tidak mendapatkan bantuan dari Jepang, Korea Utara masih menerima bantuan dari China, Rusia, dan Korea Selatan. Proses penyelesaian isu nuklir Korea Utara ini menjadi rangkaian proses yang berulang-ulang, sehingga tidak mencapai hasil maksimal yang diinginkan yaitu pembongkaran seluruh program nuklir di Korea Utara.

Gambar 3.3 Proses Penyelesaian Isu Nuklir Korea Utara



Kepentingan nasional Jepang juga tidak sepenuhnya tercapai dalam proses penyelesaian isu nuklir Korea Utara ini. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang dengan keikutsertaannya dalam SPT adalah keamanan negara yang bebas dari ancaman senjata nuklir Korea Utara dan terselesaikannya isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara. Rasa aman terbebas dari ancaman senjata nuklir Korea Utara tidak pernah dirasakan sepenuhnya oleh Jepang, karena Korea Utara cenderung bersikap tidak konsisten dalam tindakan non-proliferasi program nuklirnya, bahkan sampai sekarang pun isu nuklir Korea Utara ini belum benar-benar terselesaikan. Walaupun Korea Utara pernah mengatakan akan membongkar seluruh program pengembangan senjata nuklirnya, sampai sekarang hal tersebut tidak pernah sepenuhnya direalisasikan dan Korea Utara tetap melakukan percobaan-percobaan peluncuran senjata nuklir.

Korea Utara menggunakan isu nuklir ini sebagai alat tawar menawar untuk mendapatkan kebutuhan domestiknya. Apabila Korea Utara bersedia menuntaskan program non-proliferasi nuklirnya, negara tersebut tidak akan memiliki senjata yang ampuh untuk memeras AS dan Jepang. Begitu pula dengan isu penculikan, walaupun Jepang telah menemukan titik terang dan Korea Utara telah memenuhi

tuntutan Jepang; tetapi masalah ini sampai sekarang belum tuntas karena Korea Utara tidak memberikan keterangan yang sepenuhnya bisa dijamin kebenarannya.

Berdasarkan dinamika sikap Korea Utara setelah menerima kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang, diplomasi bilateral Jepang terhadap Korea Utara dapat dikatakan kurang berhasil dan tidak efektif sepenuhnya. Menyadari kekurangan tersebut, Jepang memanfaatkan diplomasi multilateral terhadap Korea Utara. Posisi Jepang dalam menghadapi Korea Utara menjadi lebih kuat karena persekutuanannya dengan AS yang notabene adalah target utama Korea Utara dalam melaksanakan diplomasi nuklirnya.

Sanksi atau peringatan oleh forum internasional pada Korea Utara tentu akan lebih efektif daripada sanksi yang diberikan oleh satu negara saja; apalagi negara tersebut memiliki hubungan kurang harmonis akibat berbagai konflik dari masa lalu yang tak terselesaikan hingga saat ini Korea Utara.

Diplomasi multilateral Jepang melalui SPT melengkapi diplomasi bilateral yang dijalankan Jepang terhadap Korea Utara. Dengan mengikuti SPT Jepang mendapat keuntungan ganda: isu nuklir yang sangat penting bagi keamanan Jepang akan lebih mudah dirundingkan untuk dicari solusinya karena Korea Utara menerima tuntutan dari negara-negara kawasan, dan menguatnya posisi tawar Jepang untuk penyelesaian masalah penculikan karena dukungan AS sehingga Korea Utara akan lebih mempertimbangkan tuntutan Jepang.

Begitu juga sebaliknya, diplomasi bilateral melengkapi diplomasi multilateral yang dijalankan Jepang. Diplomasi bilateral membuat Jepang lebih terfokus dalam penyelesaian isu penculikan yang telah lama menjadi permasalahan antara kedua negara, hubungan normalisasi bisa diusahakan sehingga stabilitas dan keamanan kawasan lebih terjaga, dan bantuan luar negeri serta sanksi yang diberikan Jepang dapat memberikan kontribusi agar Korea Utara mempertimbangkan program non-proliferasi nuklirnya sehingga memudahkan proses SPT. Sehingga dapat dikatakan diplomasi bilateral dan multilateral Jepang terhadap Korea Utara bersifat saling melengkapi.

BAB 4

KESIMPULAN

Isu nuklir Korea Utara telah menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Timur selama dua dekade terakhir. Korea Utara mempergunakan isu nuklir ini sebagai alat tawar untuk mendapatkan perhatian dunia internasional, khususnya AS sebagai negara adidaya yang dianggap sebagai ancaman di Asia Timur baginya dan untuk mendapatkan bantuan domestik negaranya yang dilanda berbagai kekurangan.

Jepang adalah negara tetangga Korea Utara yang paling merasakan ancaman dari isu nuklir ini. Hal ini disebabkan karena kedekatan geografis Jepang dengan Korea Utara, hubungan yang kurang harmonis antara kedua negara akibat isu penculikan dan konflik sejarah yang tak terselesaikan, serta karena persekutuan Jepang dengan AS yang terjalin sejak Perang Dunia II dan mengharuskan Jepang menjalankan politik luar negeri yang sejalan dengan kepentingan strategis global AS.

Percobaan-percobaan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, baik berbentuk peluncuran roket, rudal, maupun misil; selalu jatuh atau melewati wilayah Jepang, sehingga Jepang merasa terancam dengan program proliferasi nuklir Korea Utara ini.

Ancaman yang dirasakan Jepang berasal dari persepsi yang terbentuk dari nilai, keyakinan, dan pengamatan Jepang karena pengalamannya semasa perang dan pernah menjadi korban bom atom yang menyebabkan banyak korban jiwa serta trauma berkepanjangan, sehingga Jepang memutuskan menjadi negara pecinta damai.

Menghadapi isu nuklir Korea Utara ini, Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan luar negeri agar kepentingan nasionalnya terpenuhi dalam rangka mempertahankan kelangsungan pemerintahannya yang didasari oleh insting untuk bertahan yang sudah tertanam pada bangsa Jepang sejak jaman dahulu.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang terhadap Korea Utara adalah dengan melakukan diplomasi dialog dan tekanan, serta diplomasi ekonomi. Dalam

diplomasi dialog, Jepang menggabungkan antara diplomasi bilateral dan multilateral yang saling melengkapi. Diplomasi multilateral dijalankan Jepang dengan bergabung dalam *Six Party Talks* (SPT) bersama AS, Rusia, China, dan Korea Selatan. Diplomasi tekanan dijalankan dengan mengeluarkan sanksi-sanksi bagi Korea Utara dan diplomasi ekonomi dengan memberikan bantuan luar negeri bagi Korea Utara.

Kepentingan strategis jangka pendek Jepang dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara adalah agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara terkait penyelesaian isu penculikan yang telah menjadi prioritas dalam diplomasi Jepang. Sedangkan kepentingan strategis jangka panjang Jepang adalah normalisasi hubungan antara Korea Utara dan penyelesaian isu nuklir Korea Utara dengan target akhir denuklirisasi seluruh fasilitas nuklir di Korea Utara, sehingga stabilitas dan keamanan kawasan tercapai. Tetapi kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara kurang berhasil karena peran Jepang dalam SPT dinilai sangat minimal dan lebih mementingkan kepentingan nasionalnya yang bukan merupakan topik utama dalam perundingan tersebut. Ketidakberhasilan kebijakan Jepang juga terlihat dari pemerintah Korea Utara yang tetap menunjukkan sikap yang tidak konsisten selama proses penyelesaian melalui perundingan tersebut. Korea Utara tetap bertahan di bawah tekanan dunia internasional, AS, dan Jepang; serta terlihat tidak sungguh-sungguh untuk melakukan denuklirisasi, bahkan tetap melanjutkan program pengembangan nuklir di negaranya.

Normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea hanya bisa dicapai dengan membangun persepsi yang sama melalui dialog yang baik, kompromi dengan menekan ego masing-masing negara yang cenderung bersikap menuntut pihak lain tanpa bercermin atau memulai niat baik terlebih dahulu, serta bekerjasama melalui proses aktif untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya stabilitas dan keamanan kawasan.

Selain memikirkan untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya, kedua negara tersebut juga harus bekerjasama menciptakan *mutual understanding* dan *mutual trust* sehingga terbentuk hubungan bilateral yang lebih harmonis dari sebelumnya. Bila hal itu terwujud, tentu akan membawa dampak yang positif bagi

wilayah Asia Timur dan juga bagi perdamaian dunia. Kepentingan strategis AS di Asia Timur telah memecah negara-negara Asia Timur sejak akhir Perang Dunia II, selama Perang Dingin, bahkan hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan bertambah besarnya kekuatan AS di sehingga eksistensi AS sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia tetap terjaga. Apabila integrasi regional di Asia Timur tercapai, maka negara-negara yang serumpun dan bertetangga yang sekarang mempunyai hubungan yang tidak harmonis karena saling curiga dan tidak percaya; akan saling rukun dan saling melindungi serta tidak akan terpecah belah. Hal ini akan menjadi sebuah konsep fundamental yang kuat untuk stabilitas dan keamanan kawasan.

Demikianlah kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pendidikan apabila terdapat penelitian-penelitian lain yang membutuhkan data atau informasi tambahan mengenai penerapan kebijakan luar negeri Jepang terhadap negara-negara lain di dunia.

DAFTAR REFERENSI

PUSTAKA BUKU

Anwar, Dewi Fortuna, ed. *Development, Migration and Security in East Asia: People's Movements and Non-Traditional Security Challenges in a Changing East Asia*. Jakarta: The Habibie Center, 2005

Barton, John H. *The Politics of Peace: an Evaluation of Arms Control*. California: Stanford University Press, 1981

Blaker, Michael K. "Probe, Push, and Panic". *The Foreign Policy of Modern Japan*. Ed. Robert A Scalapino. England: University of California Press, 1977. 55-101

Buzan, Barry dan Ole Waever. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003

Byung-Joon, Ahn. "The Strategic Environment: US Power and Asian Regionalism". *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*. Japan: Japan Center for International Exchange, 2003

Cleary, Thomas. *Seni Perang Jepang (The Japanese Art of War): Untuk memahami strategi, budaya dan bisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1994

Dianawati, Ajen. *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap: RPUL Dunia*. Jakarta: PT Wahyu Media, 2006

Drifte, Reinhard. *Japan's Foreign Policy*. London: Routledge, 1990

Hellmann, Donald C. "Japanese Security and Postwar Japanese Foreign Policy". *The Foreign Policy of Modern Japan*. Ed. Robert A Scalapino. England: University of California Press, 1977: 321-340

Hendry, Joy. *Understanding Japanese Society*. Second Edition, 1995

Hermawan, Julius P, ed. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

Hill, Christopher. *The Changing politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan, 2003

Holsti, K.J. *International Politics: A Framework for Analysis*. (Sixth Edition). New Jersey: Prentice-Hall International Editions, 1992

Hook, Glenn D dan Gavan McCormack. *Japan's Contested Constitution: Document and Analysis*. London: Routledge, 2001

Hook, Glenn D, et al., ed. *Japan's International Relations: Politics, Economics, and Security*. Second Edition. New York: Routledge, 2001

Irsan, Abdul. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007

-----, *Hari-Hari yang Mendebarkan: Catatan Seorang Diplomat*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007

Katzenstein, Peter dan Nobuo Okawara. "Japan and Asian-Pacific Security: Regionalization, Entrenched Bilateralism, and Incipient Multilateralism. *Rethinking Japanese Security*. Oxon: Routledge, 2008. 104-132

-----, et al., "Immovable Object? Japan's Security Policy in East Asia" *Rethinking Japanese Security*. Oxon: Routledge, 2008. 133-149

Kim, Samuel S. *North Korean Foreign Relations in the Post-Cold War World*. US: Strategic Studies Institute of the US Army War College (SSI), 2007

Kolodzie, Edward A. *Conflict and Arms Control An Uncertain Agenda*. Ed. Paul R. Viotti. USA: Westview Press Inc, 1986

Kosaka, Masataka. "International Economic Policy". *The Foreign Policy of Modern Japan*. Ed. Robert A Scalapino. England: University of California Press, 1977. 207-226

Kwan-Chi, Oh. *The Korean Peninsula. Prospects for Arms Reduction Under Global Détente: The Military Balance on The Korean Peninsula*. USA: Westview Press Inc, 1990

Labib, Muhsin, et al., ed. *Ahmadinejad! David di Tengah Angkara Goliath Dunia*. Jakarta: Penerbit Hikmah, 2006

Levin, Norman D. *The Korean Peninsula. Prospects for Arms Reduction Under Global Détente: Global Détente and North Korea's Strategic Relations*. Ed. William J Taylor Jr, Cha Young-Koo, dan John Q Blodgett. USA: Westview, 1990

Mailer, Norman. *Why Are We at War?* New York: Random House Trade Paperbacks, 2003

Nishihara, Masashi. *East Asian Security*. New York: New York University Press, 1985

Novas, Himilce., Lan Cao, dan Rosemary Silvas. *Everything You Need to Know About Asian-American History*. 2004 Edition. United States of America: Plume (the Penguin Group), 2004

Noda, Yoshiyuki. *Introduction of Japanese Law*. Ed. Trans. Anthony H Angelo. Jepang: University of Tokyo Press, 1976

Pap, Daniel S. *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*. USA: Macmillan College Publishing, 1997

Pyle, Kenneth B. *Generasi Baru Zaman Meiji: Pergolakan Mencari Identitas Nasional (1885-1895)*. Jakarta: PT Gramedia, 1988

Reischauer, Edwin O. *The Japanese Today: Change and Continuity*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1988

Reischauer, Edwin O. "Sistem Politik Jepang" *Perbandingan Sistem Politik*. Ed. Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006. 200-232

Roy, S.L. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Saeki, Kiichi. *United States-Japanese Relations The 1970's (Japan's Security in a Multipolar World)*. Ed. Priscilla Clapp dan Morton H Halperin. London: Harvard University Press, 1974

Seng, Ann Wan. *Rahasia Bisnis Orang Jepang: Langkah Raksasa Sang Nippon Menguasai Dunia* (translation: *Rahsia Bisnes Orang Jepun*). Jakarta: Penerbit Hikmah, 2007

Sugimoto, Yoshio. *An Introduction to Japanese Society*. British: Cambridge University Press, 2002

Surajaya, I Ketut, ed. *Pengantar Sejarah Jepang 2 (Nihon no Rekishi)*. Jakarta, 2001

Takeshi, Yuasa. *Japan's Multilateral Approach toward Central Asia*. Sapporo Japan: Slavic Research Center (SRC), 2007

Weston, Burns H, ed. "Facing Up to Nuclear Extinction" *Toward Nuclear Disarmament and Global Security: a Search for Alternatives (Studies on a Just World Order, number 4)*. USA: Westview Press Inc, 1984

Wirengjurit, Dian. *Kawasan Damai Dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya*. Bandung: PT Alumni, 2002

Diplomatic Bluebook 2002. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Diplomatic Bluebook 2003. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Diplomatic Bluebook 2004. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Diplomatic Bluebook 2005. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Diplomatic Bluebook 2006. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Diplomatic Bluebook 2008. Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

East Asian Strategic Review 2003. National Institute for Defense Studies. The Japan Times, 2003

PUSTAKA JURNAL/KORAN/MAJALAH

Ashizawa, Kuniko. "Tokyo's Quandary, Beijing's Moment in the Six-Party Talks: A Regional Multilateral Approach to Resolve the DPRK's Nuclear Problem." *Pacific Affairs: An International Review of Asia and the Pacific* Vol. 79 no.3 (Fall 2006): 411-432.

Becthol, Bruce E. "North Korean Nuclear and Missile Issues and the ROK-US Collaboration: An American Perspective." *Korea Observer: A Quarterly Journal* Vol. 35 no. 1 Spring 2004: 41-57. The Institute of Korean Studies.

Chull, Kim Sung. "North Korea: From Alignment with China to Active Independence." Jepang: Hiroshima Peace Institute, 2008.

Efron, Sonni. "Japan Freezes Aid to N. Korea Over Missile." *Los Angeles Times* 2 September 1998.

Glosserman, Brad. "Current Concerns/Developments in East Asian Security." *Pacific Forum CSIS* Maret 2003: 11-30.

Hadi, Syamsul dan Shanty Dharmastuti. "Posisi dan Peran Jepang dalam Mewujudkan Integrasi Regional di Asia Timur." *MANABU Journal of Japanese Studies: Japan in Asia* Vol. 1 no. 1 Agustus 2005: 15-32. Manabu Institute.

Hajime, Izumi. "Seoul Opens Its Arms to North Korea." *Japan Echo* Vol 33 no. 5 10 October 2006: 31-34.

Hale, Christopher. "North Korean in Evolution: The Correlation Between the Legal Framework and the Changing Dynamic of Politics and the Economy." *Korea Observer: A Quarterly Journal* Vol. 33 no. 3 (2002): 363-400.

Hendrickson, David C. "Imperialism Versus Internationalism: The United States and World Order." *Gaiko Forum: Japanese Perspective on Foreign Affairs*. English Edition Fall 2002 Vol. 2 no. 3: 35-42. Toshi Shuppan.

Irsan, Abdul. "Orientasi Pertahanan Jepang dan Implikasinya terhadap Stabilitas di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara." *Manabu: Journal of Japanese Studies* Vol. 2 No. 1 (Juni 2007): 1-30.

Ishizu, Tomoyuki. "The Japanese Way in Warfare: Japan's Grand Strategy for the Twenty-First Century." *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol. XII no. 1 (Summer 2000): 195-209.

Kenji, Hiramatsu. "Leadup to the Signing of the Japan-DPRK Pyongyang Declaration." *Gaiko Forum* Winter 2003: 4-23.

Kun Lee, Choon. "Arms Buildup Phenomena in East Asia: Causes and Patterns." *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol. XII no. 1 (2000): 155-194.

Lee, Jung-Hoon. "Korean-Japanese Relations: The Past, Present and Future." *Korea Observer* Vol. XXI no. 2. Summer 1990: 159-178. The Institute of Korean Studies.

Lunn, Jon. "North Korea: The Nuclear Issue and Prospects for Change." *UK House of Commons Library Research Papers* 10 Januari 2007. UK House of Commons Library.

Lee, Jung-Hoon dan II Hyun Cho. "The North Korean Missile: A Military Threat or a Survival Kit?" *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol. XII no. 1 (2000): 131-154.

Manyin, Mark E. "Foreign Assistance to North Korea." *CRS Report for Congress* 26 May 2005. US: Congressional Research Service The Library of Congress.

Medalia, Jonathan, et al., "Nuclear Weapons R & D Organizations in Nine Nations." *CRS Report for Congress* 16 March 2009. US: Congressional Research Service The Library of Congress.

Nam, Chang-hee dan Wook Kim. "North Korea-Japan Negotiations for Diplomatic Normalization: A Game-theoretic Analysis." *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol, XII no. 1 (Summer 2000): 109-130. Korea Institute for Defense Analysis.

Nam, Mankwon. "Dealing with North Korea's Nuclear and Missile Proliferation." *The Korean Journal of Defense Analysis* Vol. XII no. 1 (Summer 2000): 87-108. Korea Institute for Defense Analysis.

Oberdorfer, Don. "The Two Koreas: A Contemporary History." *Korea Observer: A Quarterly Journal* Vol. 33 No. 1 Spring 2002: 169-172. The Institute of Korean Studies.

Park, John S. "Inside Multilateralism: The Six Party Talks." *The Washington Quarterly* Autumn 2005: 75-91.

Scobell, Andrew. "Kim Jong Il and North Korea: The Leader and The System." March 2006. The Strategic Studies Institute.

Shinichi, Kitaoka. "Reform in Japanese Foreign Affairs: Policy Review Long Overdue." *Gaiko Forum: Japanese Perspective on Foreign Affairs*. English Edition Fall 2002 Vol. 2 no. 3: 3-12. Toshi Shuppan.

Soderberg, Marie. "Can Japanese Foreign Aid to North Korea Create Peace and Stability?" *Pasific Affairs: An International Review of Asia and the Pasific* Vol. 79 no. 3 (2006): 433-454.

Song, Young-Soon. "Review of Recent East Asian Security Environment and Asia Pasific Maritime Strategy." *Korea Observer: A Quarterly Journal* Vol. 33 No. 1 Spring 2002: 135-168. The Institute of Korean Studies.

Virgianita, Asra dan Nara Masista Rakhmatia. "Kebijakan Pertahanan Jepang: Tinjauan Strategis NDPG 2005." *Manabu: Journal of Japanese Studies* Vol. 2 No. 1 (Juni 2007): 31-56.

Wibawarta, Bambang. "Hubungan Jepang – Korea Utara." *MANABU Journal of Japanese Studies: The Future of Japan* Vol. 1 No. 1 (Agustus 2005): 73-82. Manabu Institute.

"Diplomacy on Koizumi's Agenda." *Japan Echo* Vol. 32 No. 2. 2 april 2005.

"Japan's Crisis." *Japan Echo* Vol. 26 No. 1 1999. Japan Echo Inc.

"Japan and North Korea: Bones of Connection." *Asian Report* No. 100 27 Juni 2005: 1-29. International Crisis Group.

"AS Peringatkan "Provokasi" Korea Utara." *Kompas* 5 Februari 2009: 5.

"Kisah Malang Wanita Korea Utara." *Kompas* 19 Maret 2008: 8.

"Korea Utara yang Serba Bersih dan Misterius." *Intisari* Mei 2009: 56-64.

"Korut Ancam Perlambat Proses Pelucutan." *Kompas* 28 Desember 2008: 9.

"Korut Bersiap Uji Coba Nuklir Lagi." *Kompas* 2 Juni 2009: 10.

"Korut Luncurkan Rudal." *Kompas* 29 Maret 2008: 9.

"Korut Serahkan Dokumen." *Kompas* 27 Juni 2008: 9.

"Misteri Sukses Dinasti Kim" *Kompas* 7 Juni 2009: 5.

"No Cell Phone Use Outside." *ps*: November. 2008: 12. PT. Integra Tunggal Duatiga.

"The Japan of Today." 1976. Ministry of Foreign Affairs Japan.

“White Papers of Japan 1975-1976: annual abstract of official reports and statistic of the Japanese government.” 1977. Tokyo: Japan Institute of International Affairs.

KARYA ILMIAH/WAWANCARA

Irsan, Abdul. *Orientasi Pertahanan Jepang dan Implikasinya terhadap Stabilitas di Kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara*. Materi Kuliah Kajian Diplomasi dan Politik Jepang (semester 2). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. 2 Februari 2007

Irsan, Abdul. *Ringkasan: Jepang, dari Sudut Pandang Seorang Diplomat Indonesia*. Materi Kuliah Kajian Diplomasi dan Politik Jepang (semester 2). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. Februari 2007

Irsan, Abdul. *Peranan Budaya Politik dalam Hubungan Internasional Jepang*. Materi Kuliah Kajian Diplomasi dan Politik Jepang (semester 2). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. 5 Mei 2007

Jakobson, Linda. “The Korean Peninsula: Is Kim Dae-Jung's Pursuit of a Korean Confederation Realistic?” *FIIA (UPI) Working Papers*. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs (FIIA), 1999

Juwana, Hikmahanto. *Masyarakat Jepang Tak Perlu Hukum?* Materi Kuliah Sistem Hukum Jepang (semester 2). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. 26 Maret 2007

Kan, Hideki. *Postwar Japanese Diplomacy*. Materi Kuliah Kapita Selektu Studi Jepang A (semester 3). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. 27 Agustus 2007

Kan, Hideki. *War and Remembrance in East Asia*. Materi Kuliah Kapita Selektu Studi Jepang A (semester 3). Kajian Wilayah Jepang. Universitas Indonesia. Agustus 2007

PUSTAKA ELEKTRONIK

Besheer, Margaret. “UN Condemns North Korea Rocket Launch” Voice of America (VOA) 13 April 2009. 6 Mei 2009. <<http://www.voanews.com/english/2009-04-13-voa43.cfm>>

Benjian, Xin. “Security Dilemma, Balance of Power Vs. US Policy Towards China in the Post-Cold War Era”. Louyang PLA Foreign Language College. Xiandai Guoji Guanxi (Contemporary International Relations). 30 Maret 2008. <<http://www.uscc.gov/researchpapers/2000-2003/pdfs/secur.pdf>>

Sinaga, Deddy. "Korea Utara Setuju Hentikan Program Senjata Nuklir". *Tempo Interaktif* 19 September 2005. 10 Desember 2007. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2005/09/19/brk,20050919-66787.id.html>>

Tobing, Maruli. "Giliran Korut Mengintimidasi AS" Kompas Cyber Media (KCM) 18 Oktober 2006. 2 Juni 2009 < <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0610/18/ln/3029081.htm>>

Zissis, Carin dan Jayshree Bajoria. "The Six-Party Talks on North Korea's Nuclear Program" Council on Foreign Relations 14 Oktober 2008. 28 April 2009. <<http://www.cfr.org/publication/13593/>>

"Japan Freezes Food Aid to North Korea" *BBC News* 13 Desember 2004. 12 Mei 2009 <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4091833.stm>>

"Jepang Perpanjang Sanksi untuk Korut" *Tribun Kaltim* 11 April 2009. 12 Mei 2009 <<http://www.tribunkaltim.co.id/read/artikel/26669>>

"Publik Jepang Setuju Korut Ditindak Tegas" Kompas Cyber Media (KCM) 26 Mei 2003. 19 Mei 2009 <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/26/ln/332091.htm>>

"Korea Utara Luncurkan Roket Jarak Jauh" Kompas Cyber Media (KCM) 6 April 2009. 28 April 2009 <<http://cetak.kompas/read/xml/2009/04/06/03013845/korea.utara.luncurkan.roket.jarak.jauh>>

"Sikap Korut Berubah Drastis Soal Nuklir". Kompas Cyber Media (KCM) 15 April 2003. 23 Desember 2007 <<http://www.kompas.com/Kompas-cetak/0304/15/ln/256085.htm>>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 29 Mei 2008 <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0402.html>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 29 Mei 2008 <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 5 Mei 2009. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/press0807.html>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 8 Mei 2009. <http://www.mofa.go.jp/announce/event/2008/8/1182464_940.html>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 8 Mei 2009. <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/meeting/consult0512.html>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 8 Mei 2009.
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/meeting/summary0407.html

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 8 Mei 2009.
<<http://www.mofa.go.jp/announce/event/2004/8/0809.html>>

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 8 Mei 2009.
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0308.html

MOFA: The Ministry of Foreign Affairs of Japan. 12 Mei 2009.
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/pmv0209/pyongyang.html



Lampiran 1: Perbandingan Jepang dan Korea Utara

	Jepang	Korea Utara
Penduduk	127.770.000 jiwa	22.224.195 jiwa
Geografi	Terletak di Asia Timur, merupakan serangkaian pulau antara Laut Pasifik Utara dan Laut Jepang, berada di Timur Semenanjung Korea.	Terletak di Asia Timur dan menduduki paruh utara Semenanjung Korea. Berbatasan dengan Cina di sisi Utara, Rusia di sisi Timur Laut, Korea Selatan di sisi Selatan, dan Teluk Korea serta Laut Kuning di sisi Barat.
Luas Wilayah	377.835 km ²	120.540 km ²
Personil militer	236.368 personil	1.100.000 personil
Perlengkapan Militer	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan lapis baja • Kapal selam • Kapal perusak • Fregat • Kapal patroli • Kapal patroli pantai • Pesawat tempur • Helikopter 	<ul style="list-style-type: none"> • Instalasi militer bawah tanah • Tank • Kendaraan pengangkut personil • Kapal selam • Fregat • Pesawat tempur buatan Uni Soviet
Kapabilitas Militer	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkal serangan yang kemungkinan mengandung senjata nuklir, kimia, atau biologis • <i>Counter Cyber Attack</i> • Pengamanan informasi teknologi • Pengamanan komunikasi internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • 100.000 personil pasukan khusus • Keahlian sabotase • Keahlian perang gerilya
Persenjataan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pertahanan antirudal: Rudal pencegat SM-3 • Rudal Patriot buatan AS 	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncur roket • Senjata 37-mm anti pesawat terbang • Misil • Peluru kendali • Artileri angkatan laut

Sumber: <http://www.japaneselifestyle.com.au/japan/japangeography.htm>;

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Japan;

<http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Korea-North.html>;

Gunawan, Ilham dan Frans BS, *Kamus Politik: Dalam dan Luar Negeri* 217, 248

Lampiran 2: Kemampuan Rudal Korea Utara

Nama (alternatif nama)	Jangkauan Maks. (km)	Hulu Ledak (kg)	Tingkat	Panjang (m)	Diameter (m)	Berat (tons)
Hwangsong-5 (Scud Mod.-5, Scud-B)	320-340	1.000	1	11.16	4.88	45.86
Hwangsong-6 (Scud Mod.-C, Scud-C, Scud- PIP)	500	770	1	11.3	.88	45.93
Rodong (Rodong-1, Rodong-1, Scud Mod.-D, Scud- D)	1.350	1.200	1	17.4	1.32	16.25
Taepodong-1 (Taepodong-1, Rodong-2, Scud X, Scud Mod.- E, Rodong-2)	1.500 – 2.200	700 – 1.000	2	27.3 (163/11)	1.32/.884	20.4
Taepodong-1 SLV	4000	50- 100	3	27.9 (1.63/8. 1/3.5	1.32/.884 /884	19.9
Taepodong-2 (Taepodong-2, Rodong-3)	4.000 – 6.000	700 – 1.000	2 3	5.4 (18/17. 4)	2.4/1.33	69.4
	6.000+	100- 500				

Sumber: *Jane's International Defense Review*, July 1999, dalam Jung-Hoon Lee and Il Hyun Cho, "The North Korean Missiles: A Military Threat or Survival Kit?," *The Korean Journal of Defense Analysis*, Vol. XII, No. 1 (Summer 2000) 137.